Rencana Strategis

Dinas Kehutanan Provinsi Riau
2014-2019

Pekanbaru, November 2014

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2014 - 2019

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI RIAU
PEKANBARU

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel iv

I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang I-1
- 1.2. Landasan Hukum..... I-6
- 1.3. Maksud dan Tujuan I-9
- 1.4. Sistematika Penulisan I-9

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-4
- 2.2. Sumber Daya SKPD II-8
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... II-10

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.. III-1
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah... III-2
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota..... III-5
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LHS..... III-8
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis..... III-13

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Visi dan Misi SKPD..... IV-1
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... IV-3
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD IV-3

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V-1

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VI-1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	I - 4
Gambar 1.2	Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sitem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	I - 5
Gambar 1.3	Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	I - 5
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau	II - 1
Gambar 2.2	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Riau	II - 2
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau	II - 7
Gambar 3.1	Sebaran Titik Api (Hot Spot) Pada Daerah Rawan Kebakaran Provinsi Riau	III - 2
Gambar 4.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	IV - 26
Gambar 4.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	IV - 27
Gambar 4.3	Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD	IV - 28
Gambar 4.4	Kerangka Fikir Keterhubungan Antar Kinerja	IV - 28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019	I-3
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/kota Provinsi Riau	II-3
Tabel 2.2	Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Fungsinya	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi RiauBerdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II-8
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014	II-8
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Berdasrkan Eselon Tahun 2014	II-9
Tabel 2.6	Jumlah Polisi Kehutanan padal Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014	II-9
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Berdasrkan Jenis Kelamin Tahun 2014	II-9
Tabel 2.8	Pencapain kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2009-2013	II-10
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau	II-11
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kehutanan Provinsi Riau.	III-3
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	III-7
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya.	III-10
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan yang menangani Urusan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-13
Tabel 3.6	Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai TGHK (update s/d Tahun 2012)	III-16
Tabel 3.7	Berdasarkan RTRWP, Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994	III-16
Tabel 3.8	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau	III-16

Tabel 3.9	Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	IV-6
Tabel 4.2	Penentuan Alternatif Strategi	IV-29
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau	IV-33
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Riau 2014-2019 dan bersifat indikatif, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Riau.

1.1.2 Fungsi Renstra SKPD

Dokumen ini merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra SKPD

Proses penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau diawali dengan Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019, dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019, disusun oleh Tim Penyusun Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019, yang ditetapkan dengan Keptusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai dengan Keptusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.050/BP/5013 tanggal 14 Maret 2014 dan telah direvisi sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpt.050/BP/1266, tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana terlampir, dengan ketua Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan anggota sebanyak 15 orang berasal dari bidang/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Riau, sebagai berikut :

Ketua / Koordinator		:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Wakil Ketua		:	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Sekretaris		:	Ir. TONI HERMEN, MM
Wakil Sekretaris		:	PAIDI, S.Hut, MT
Anggota		:	
1.	Bagian Sekretariat	:	SRI SULISTYOWATI, SP
2.	Bidang Pemanfaatan Hutan Alam	:	BUDIANSYAH, SE
3.	Bidang Pemanfaatan Hutan Tanaman	:	SUGIYANTO, S.Hut.
4.	Bidang Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat & Hasil Hutan Bukan Kayu	:	RUDI AMRULLAH, S. Hut
5.	Bidang Planologi Kehutanan	:	Ir. AGUS RIANTO, MT
6.	Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan	:	DANANG KABUL S, S.Hut, MT, M.Si

7.	Bidang Perlindungan/Satuan Polisi Kehutanan	:	WILSON SIMANJUNTAK, S.Pt.
8.	UPT KPHP Minas Tahura	:	Ir. PDH MURTI SANTOSO, MM
9.	UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan	:	Ir. P. WISNU WARDHANA
10.	UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	:	VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM
11.	UPT KPHP Tasik Besar Serkap	:	EDY GUSNADI, S.Hut.T

Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Renstra SKPD Dinas Kehutanan 2014-2019 adalah sebagai berikut;

a. Mempersiapkan penyusunan Renstra SKPD

1. Orientasi mengenai Renstra SKPD;
2. Menyusun agenda kerja tim penyusun Rensatra SKPD dan;
3. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

b. Menyusun rancangan Renstra SKPD;

1. Merumuskan rancangan Renstra SKPD;
    a. Mengolah data dan informasi;
    b. Melakukan Analisis Gambaran Pelayanan SKPD;
    c. Melakukan Analisis Renstra K/L;
    d. Menelaah RTRW Provinsi;
    e. Menelaah KLHS;
    f. Merumuskan isu-isu strategis;
    g. Merumuskan visi dan misi SKPD
    h. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
    i. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menegah SKPD;
2. Menyajikan rancangan Renstra SKPD;

c. Menyusun rancangan akhir Renstra SKPD;

1. Menyusun rancangan Akhir Renstra SKPD, berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Mempertajam visi, misi dan meyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD;

d. Pengesahan dan Penetapan Renstra SKPD

1. Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
2. Menyiapkan Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD setelah memperoleh pengesahan kepala daerah;

Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Tahun 2014-2019

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	**Persiapan Penyusunan**																												
B.	**Penyusunan Rancangan**																												
C.	**SE - KDH Ttg Ranwal RPJMD**																												
D.	**Penyesuaian Rancangan Renstra**																												
1	Penyampaian Rancangan Renstra																												
2	Verifikasi Rancangan Renstra																												
E.	**Musrenbang RPJMD**																												
F.	**Penyusunan Rankir RPJMD**																												
G.	**Penetapan RPJMD**																												
H.	**Penyusunan Rankir Renstra**																												
I.	**Verifikasi Akhir Renstra**																												
J.	**Penetapan Renstra**																												

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

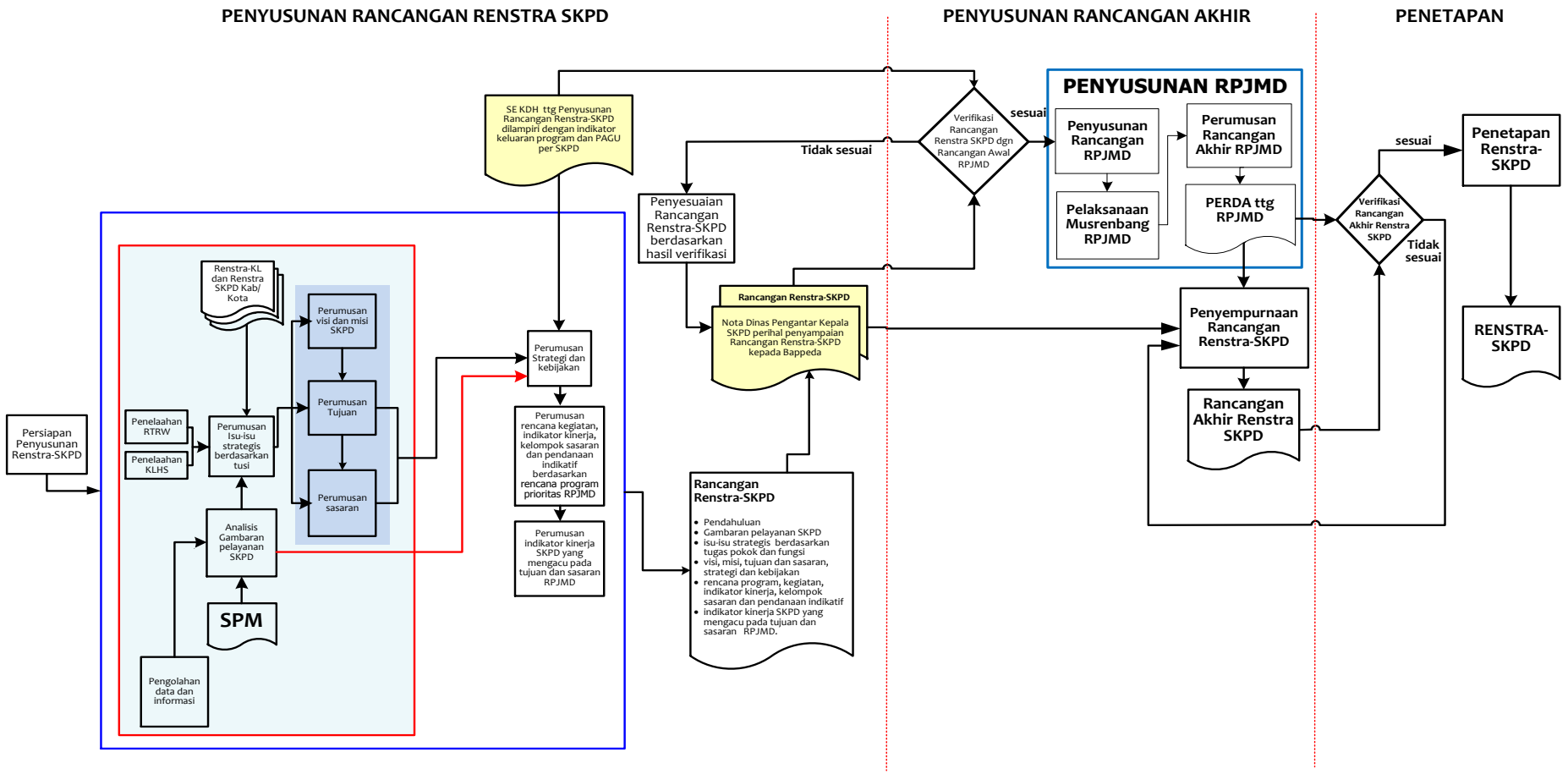

Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Renstra SKPD ini merupakan pedoman bagi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat gambar di bawah ini.

Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sitem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.2.

Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran
pada Sitem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

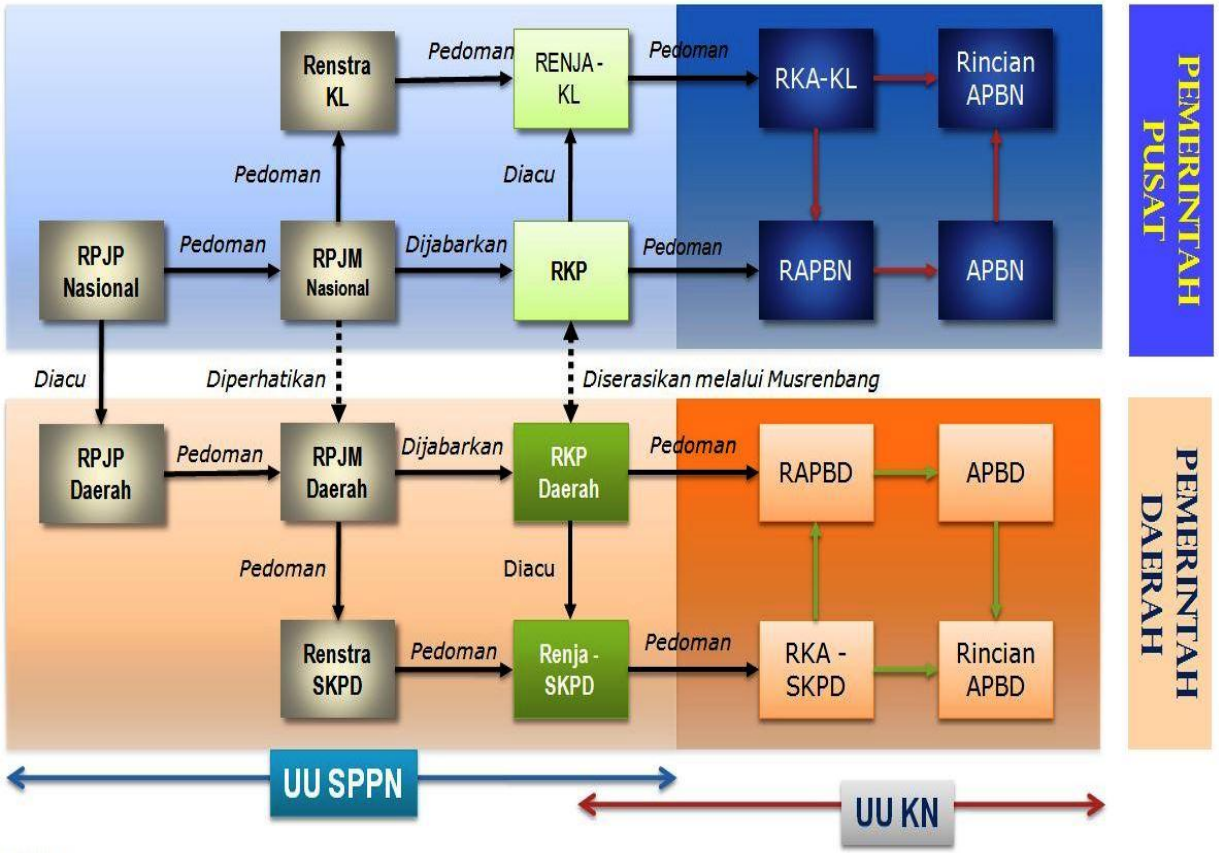

Keterangan :
RPJP : Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKP : Rencana Kerja Pemeritah
Renstra : Rencana Stregis
Renja : Rencana Kerja
KL : Kementerian/Lembaga

RAPBN : Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanj Nasional
APBD : Ranggaran Pembangunan dan Belanja daerah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA : Rencana Kerja Anggaran
UU SPPN : Undang-undang Sisitim Perencanaan Pembangunan Nasional No. 25 Tahun 2004
UU KN : Undang-undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003

Gambar 1.3.
Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

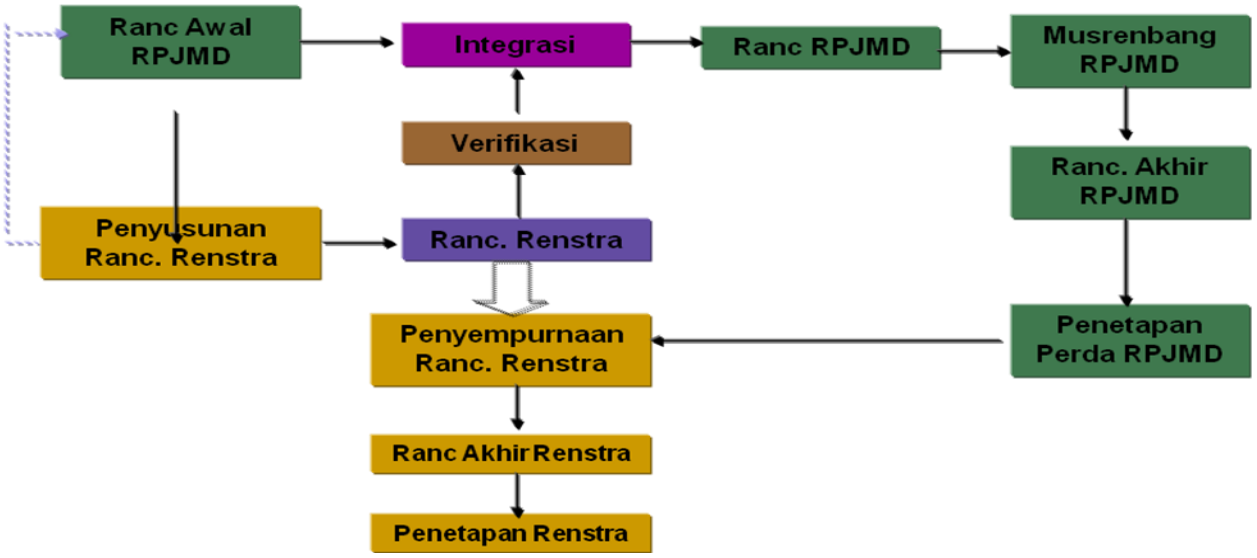

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 61);

21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);;
26. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025;
27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P: 08/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Renstra-KL Kementerian Kehutanan 2010-2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2014 Nomor 3);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategis (RENSTRA) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara berjenjang berpedoman pada RPJPD tahun 2005 – 2025 yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2014-2019 dan dijabarkan lagi pada Rencana Strategis SKPD tahun 2014-2019, selanjutnya disusun kegiatan tahunan sesuai dengan skala prioritas yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan kehutanan merupakan penjabaran operasional visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Riau. Visi dan misi ini menunjukkan arah pembangunan kehutanan yang mencerminkan upaya pengembangan potensi hutan maupun penanganan permasalahan pembangunan kehutanan sehingga mampu meningkatkan fungsi hutan dan menguatkan posisi strategis Provinsi Riau.

Selanjutnya secara teknis Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-undang 18 Tahun 2013 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan Ekosistem serta Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Riau selama selama tahun 2014-2019.

Tujuan penyusunan Rancangan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sekaligus sebagai pedoman bagi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD tahun 2014-2019 dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019, yang merupakan pokok bahasan dan susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Provinsi Riau secara gografis terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan sampai dengan 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai dengan 105°05'00" Bujur Timur dengan luas wilayah ± 107.923,71 km² atau 10.792.371 Ha, dengan prosentase wilayah daratan ± 8.915.016 Ha (82,60%) dan perairan ± 1.877.355 Ha (18,40%).

Secara geografis, terletak pada jalur yang sangat strategis yaitu pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lain sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara, Selat Singapura dan Selat Malaka
b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau

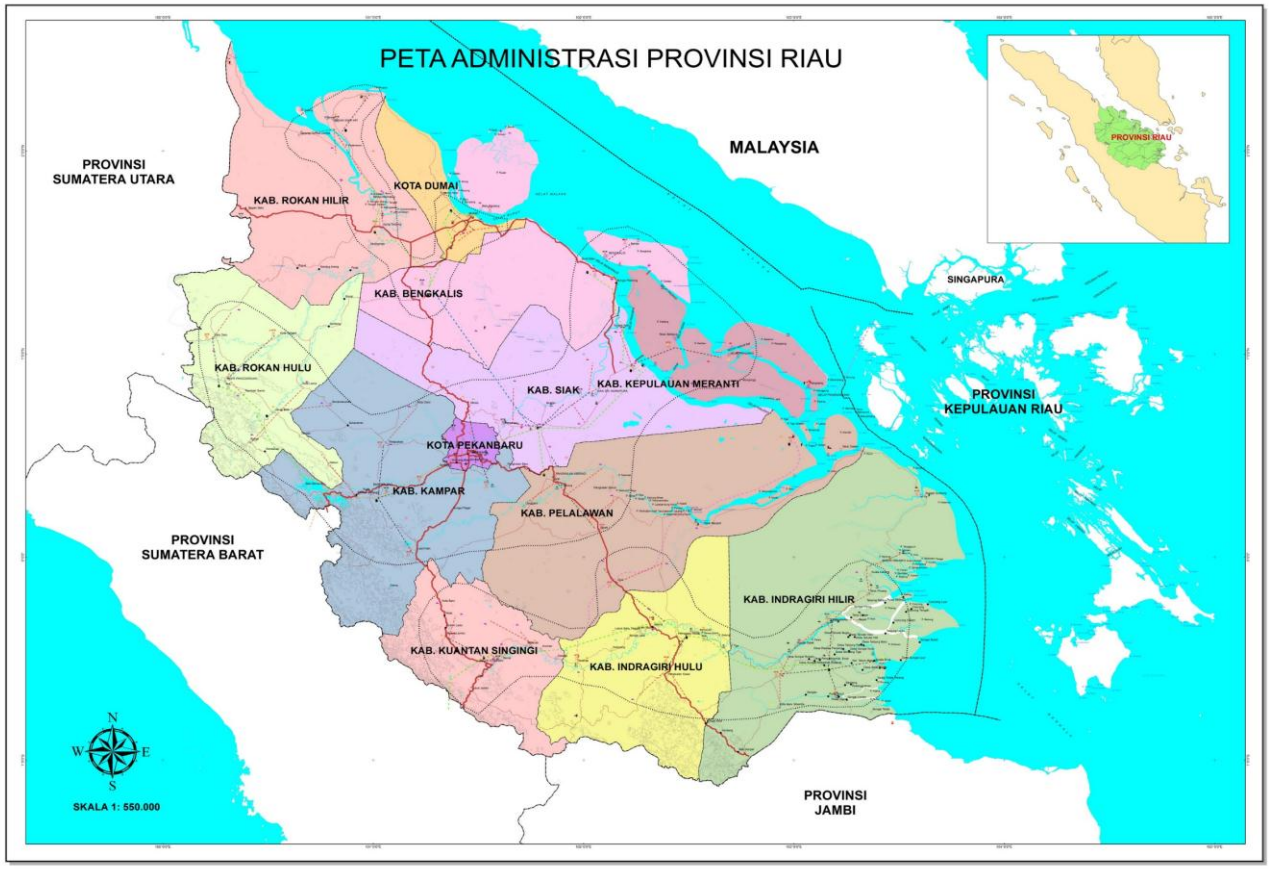

Berdasarkan pengelompokan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana terlihat pada Peta Wilayah Provinsi Riau, terdapat 15 sungai dan 4 sungai besar diantaranya mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan air yaitu:

1. Sungai Siak, panjang 300 km, dengan kedalaman 8 - 12 m
2. Sungai Rokan, panjang 400 km, dengan kedalaman 6 - 8 m
3. Sungai Kampar, panjang 400 km, dengan kedalaman sekitar 6 m
4. Sungai Indragiri, panjang 500 km, dengan kedalaman sekitar 6 - 8 m.

Keempat sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pulau-pulau yang terdapat di sepanjang pantai wilayah Riau berhadapan dengan muara sungai-sungai besar tersebut, seperti: Pulau Lalang, Rupat, Bengkalis, Padang, Ransang, Tebing Tinggi, Penyalai, Serampang, Muda, Pancung, Kateman, dan lain-lain.

Gambar 2.2

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Riau

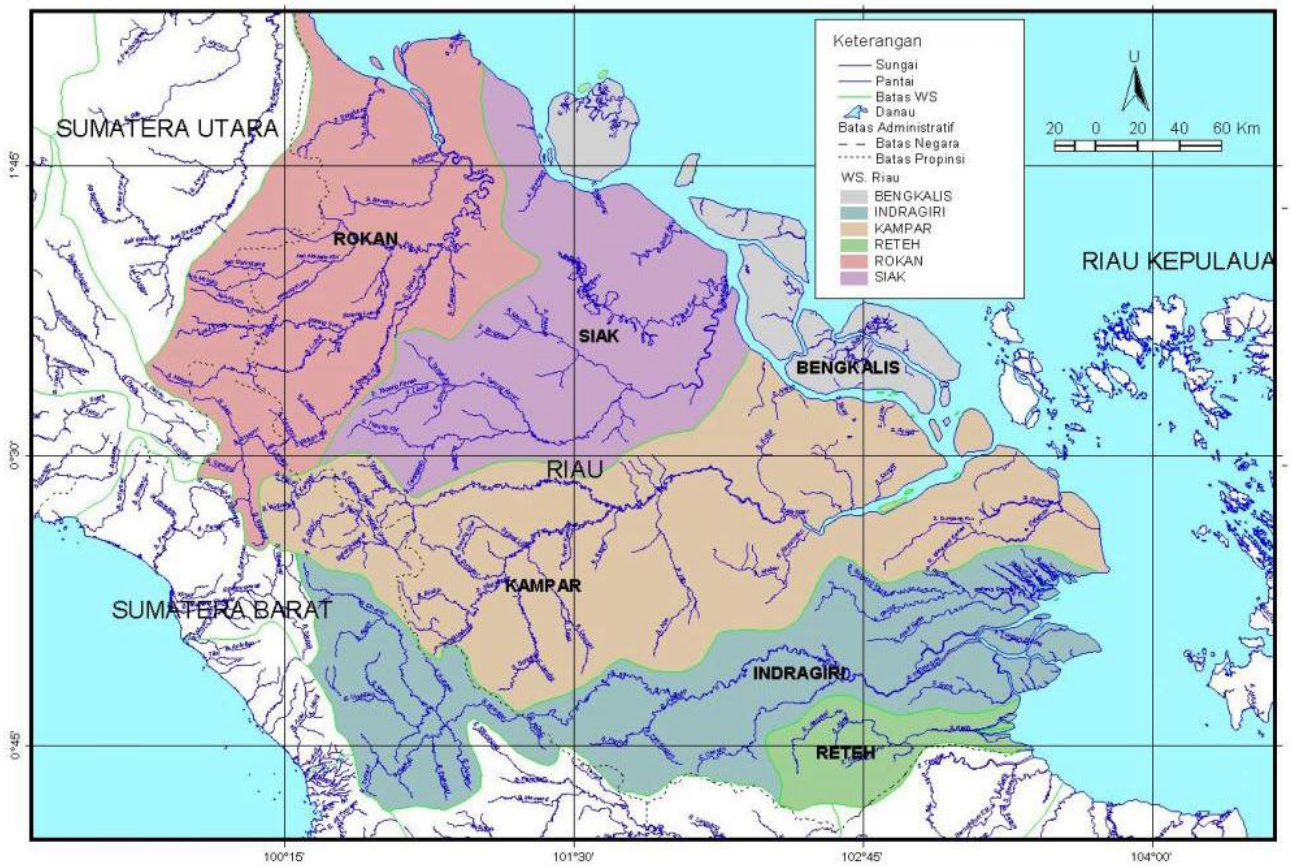

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, 158 kecamatan dan 1.840 desa. Luas wilayah Kabupaten/Kota dan persentase terhadap total luas Provinsi Riau serta ibukota masing-masingnya ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	520.216	5,84
2	Indragiri Hulu	Rengat	767.627	8,61
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837	15,48
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414	13.91
5	Siak	Siak Sri Indrapura	823.357	9,24
6	Kampar	Bangkinang	1.092.820	12.26
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	722.978	8,11
8	Bengkalis	Bengkalis	843.720	9,46
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	896.143	10.05
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	360.703	4.05
11	Pekanbaru	Pekanbaru	63.301	0,71
12	Dumai	Dumai	203.900	2,29
Provinsi Riau		Pekanbaru	8.915.016	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2013)

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2013 sebanyak 6.125.283 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,31 % dan kepadatan penduduk 68 jiwa/km.

Luas daratan $\pm$ 8.915.016 Ha (82,60%) dari luas wilayah Provinsi Riau, sebagian besar adalah kawasan hutan, yaitu $\pm$ 4.182.359 Ha (46,91%) dari luas daratan Riau. Luas non kawasan hutan 4.277.964 hektar (49,75%) serta hutan mangrove/bakau/perairan seluas 138.433,62 hektar (1,61%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Fungsinya

NO	FUNGSI	LUAS (HA)	%
1	Hutan Suaka Alam/Taman Wisata	531,852.65	6.19
2	Hutan lindung	228,793.82	2.66
3	Hutan Produksi		
	- Tetap	1,605,762.78	18.67
	- Terbatas	1,815,949.74	21.12
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.913.136,00	22.25
5	Hutan Mangrove/Bakau	138,433.62	1.61
6	Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan	1.913.136,00	22,25
	Jumlah	8,598,757.00	100.00

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan Provinsi Riau, dimana sektor ini telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan selama lebih dari 3 (tiga) dekade berupa penghasil devisa, suplai industri terkait, serta sebagai pembangkit sektor lain. Lebih dari 70% sektor lain tergantung kepada manfaat, fungsi dan keberadaan hutan.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi

kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan (*life supporting system*), hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya, dimana hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan daerah.

Pembangunan Kehutanan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, untuk sektor kehutanan termasuk dalam misi ke 8 (delapan), yaitu "***meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata***", dengan tujuan "***mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas***". Sedangkan tujuan pembangunan kehutanan nasional sejalan dengan tujuan pembangunan milenium *(millennium development goals/MDGs)* Indonesia, yaitu "***memastikan kelestarian lingkungan***", dengan target "***memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang***" Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan kehutanan daerah dengan perencanaan pembangunan kehutanan nasional.

Provinsi Riau dengan posisi yang strategis, berada dalam koridor pembangunan nasional dan global, berada pada koridor ekonomi sumatera, berada pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka), berhadapan dengan Negara Singapore dan Malaysia. Kawasan ini merupakan kutub pertumbuhan ekonomi di Asia seperti kerjasama *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asean – China Free Trade Area* (ACFTA), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) sehingga memberi pengaruh langsung terhadap pembangunan Provinsi Riau.

Pembangunan kehutanan Provinsi Riau yang didukung posisi strategis dan sumberdaya hutan yang besar, mempunyai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kehutanan harus *specific, measurable, achievable, realistic dan timely* (SMART). Sehingga hasil pembangunan kehutanan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

2.1.2. Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Umum .
c. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
    1. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
    2. Seksi Perpetaan dan Inventarisasi Hutan;
    3. Seksi Penatagunaan Hutan.
d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
    1. Seksi Pemanfaatan Hutan Alam;
    2. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman;
    3. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
    2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
    3. Seksi Penatausahaan Iuran Kehutanan.
f. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengamanan Hutan;
    2. Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan;
    3. Seksi Perlindungan Hutan.

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan, pemberdayaan masyarakat, perbenihan, rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan Taman Hutan Raya serta pengelolaan hutan di tingkat tapak, Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor … Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Berikut ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Riau :

a. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan;
c. UPT KPHP Model Minas Tahura.
d. UPT KPHP Tasik Besar Serkap

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
   a) Kepala;
   b) Sub Bagian Tata Usaha;
   c) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
   d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
b. Susunan Organisasi UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan terdiri dari:
   a) Kepala
   b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   c) Kepala Seksi Benih
   d) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan;
c. Susunan organisasi UPT KPHP Minas Tahura terdiri dari :
   a) Kepala;
   b) Sub Bagian Tata Usaha;
   c) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan
   d) Seksi Perlindungan;

d. Susunan organisasi UPT KPHP Tasik Besar Serkap :
   a) Kepala;
   b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   c) Kepala Seksi Perencanaan
   d) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, struktur organisasi Dinas Kehutanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau

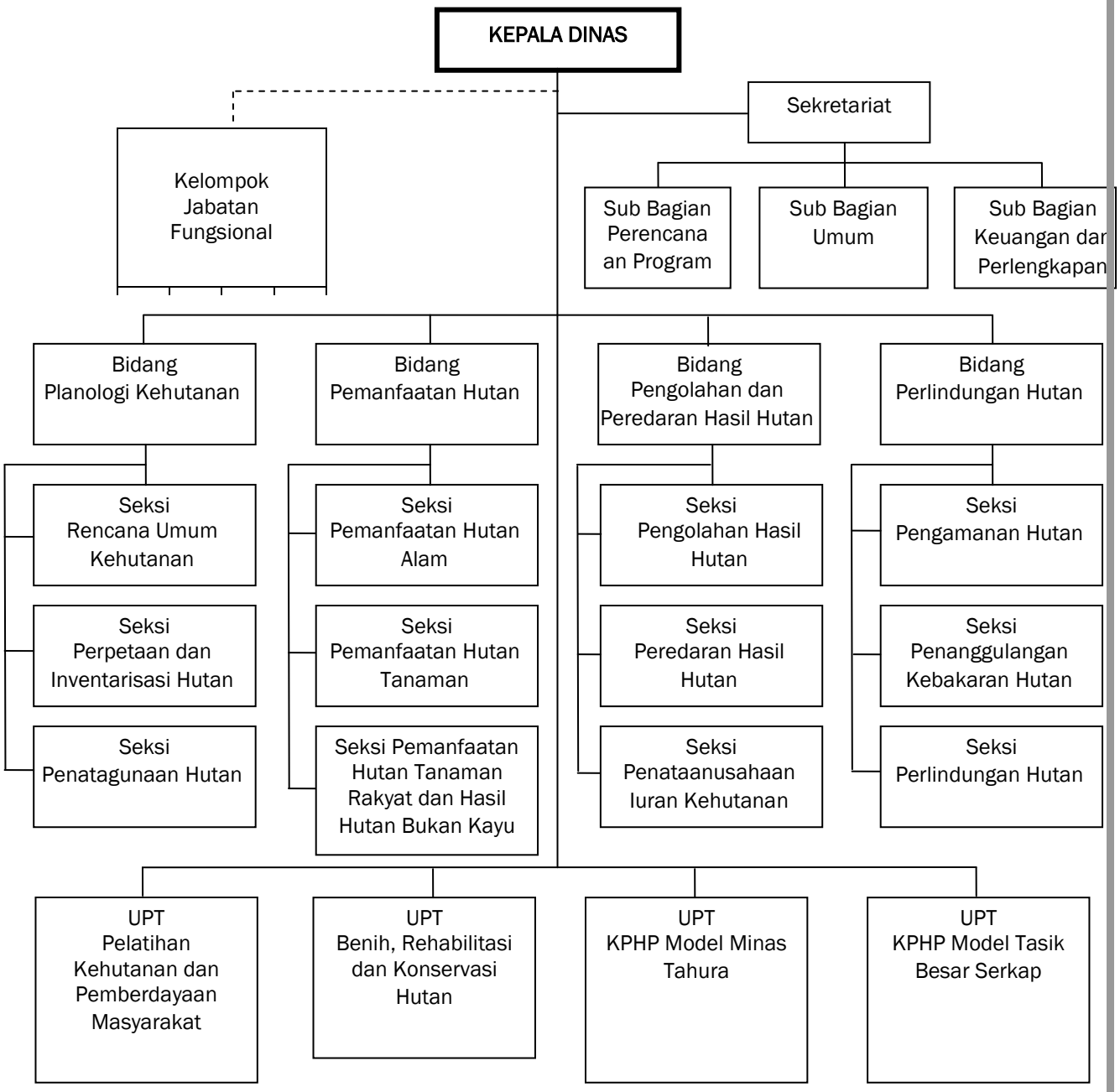

2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai dengan Maret 2014 adalah sejumlah 276 orang, dengan tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Pasca Sarjana. Berdasarkan eselon dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 8 orang dan eselon IV sejumlah 24 orang.

2.2.1 Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
A	PNS/CPNS	
1	Sekolah Dasar (SD)	2
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	136
4	Diploma (D3)	7
5	Sarjana (S1)	101
6	Pasca Sarjana (S2)	27
	Jumlah	276
B	Non PNS	
7	PTT	1
	Jumlah	-
	Jumlah Total	276

2.1.2 Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan
Pangkat dan Golongan Tahun 2014

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Golongan I / Juru	1
2	Golongan II / Pengatur	58
3	Golongan III / Penata	198
4	Golongan IV / Pembina	19
	Jumlah	276

2.1.3 Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Eselon Tahun 2014

Eselon				**JUMLAH**
I	**II**	**III**	**IV**	
-	1	8	24	33

2.1.4 Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanya terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional yaitu Polisi Kehutanan (Polhut). Jumlah Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014 adalah sebanyak 33 orang, namun demikian tidak semua Polisi Kehutanan tersebut masuk dalam jabatan fungsional. Berikut ini adalah jumlah Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2014 :

Tabel 2.6
Jumlah Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014

No	Jabatan	Jumlah
1	Fungsional	33
2	Non Fungsional	1
	Jumlah	34

2.1.5 Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 20114 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014.

No	Jenis Kelamin	Tahun 2014
1	Laki-laki	205
2	Perempuan	71
	Jumlah	276

Keadaan dan jumlah barang-barang Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2014 terdiri dari tanah 6 persil, jalan dan jembatan 3 km, jaringan 2 unit, bangunan gedung 12 unit, alat-alat angkutan 24 unit dan alat-alat kantor dan rumah tangga 2.041 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penurunan penaganan masalah kejahatan bidang kehutanan	30 Kasus	7	5	7	6	5	7	5	7	4	3	100.00	100.00	100.00	66.67	60.00
2	Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan	20%	3	6	5	4	2	3	6	5	4	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Pembinaan hutan lindung dan kawasan lindung pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/tanaman dan hutan rakyat (IUPHHK-HA/HT)	64 Unit	0	12	12	12	28	0	12	12	12	20	-	100.00	100.00	100.00	71.43
4	Rehabilitasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai	200.000 Ha.	5,000	7,000	63,000	63,000	62,000	5,000	7,000	63,000	7,000	-	-	100.00	100.00	11.11	-
5	Fasilitasi, pembinaan dan bimbingan teknis Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan se Provinsi Riau	12 Kab./Kota per tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/tanaman dan hutan rakyat (IUPHHK-HA/HT/HR)	64 Unit	12	8	10	24	10	12	8	10	24	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Pembinaan dan pengembangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kehutanan secara berkelanjutan	22 Unit	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata batas kawasan hutan IUPHHK-HA/HT	64 Ijin.	0	0	7	12	45	0	0	7	7	42	-	-	100.00	58.33	93.33
9	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Riau	4 unit.	1	1	1	0	1	1	1	1		1	-	-	100.00	-	100.00
10	Penyusunan data dan informasi sumberdaya hutan	3 Dok./ Tahun	2	2	2	3	3	2	2	2	1	3	100.00	100.00	100.00	33.33	100.00
	Jumlah												60.00	80.00	100.00	66.94	82.48

Dari Tabel.2.6, dapat diketahui bahwa ada kesenjangan/gap indikator kinerja, pada indikator penurunan penanganan masalah kejahatan bidang kehutanan target belum tercapai, karena beberapa kasus tindak pidana kehutanan telah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya. Demikian juga dengan indikator rehabilitasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai masih rendah dikarenakan pencairan dana tidak sesuai dengan tata waktu/musim penanaman dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui DBH-SDA-DR di kabupaten/kota belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk indikator Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata batas kawasan hutan IUPHHK-HA/HT, belum seluruh pemegang ijin IUPHHK-HT telah selesai melaksanakan penataan batas dan masih terkendalanya pengesahan RTRW Provinsi Riau.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Sumber Dana	Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
APBD	9,748	13,041	7,424	23,386	25,227	7,813	10,770	6,823	14,698	18,932	79.23	82.59	91.91	62.85	75.05	61.73	6.74
APBN	3,148	3,907	4,568	4,837	5,145	2,182	2,985	3,058	2,361	4,184	69.30	76.41	66.94	48.81	81.33	37.25	2.29
Jumlah	12,896	16,948	11,992	28,224	30,372	9,995	13,755	9,882	17,060	23,117	76.81	81.16	82.40	60.44	76.11	55.76	4.31

Pada Tabel 2.7, Pada tahun 2009-2011 untuk sumber dana APBD Provinsi Riau, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, sedangkan pada tahun 2012, belum baik, karena terdapat 8 kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Untuk sumber dana APBN (Dekonsentrasi), pada tahun 2010 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 menurun kembali,karena ada kebijakan penghematan anggaran hingga 10%, sedangkan pada tahun 2012 kurang baik, karena beberapa kegiatan tidak selesai dilaksanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 terdapat beberapa tantangan terkait dengan Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang menangani urusan bidang kehutanan di Provinsi Riau, maupun RTRW Provinsi Riau yang sampai saat ini masih dalam proses penetapan.

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.08/Menhut-II/2010, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 disusun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan nasional.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 paket.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA)* seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafikcing* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Pengelolaan konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi plasma nutfah pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya.
9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.

16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini "wajar tanpa pengecualian" mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket

Adapun tujuan pembangunan kehutanan pada Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
6. Menyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.

Adapun program pembangunan kehutanan pada Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah :

1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan
2. Hutan.
3. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi.
4. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
5. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
8. Kementerian Kehutanan.
9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

Renstra Kementerian Kehutanan akan berakhir pada tahun 2014 dan saat ini sedang dalam proses persiapan untuk renstra tahun 2014-2019. Hal ini sebabkan karena masing-masing renstra ditetapkan berdasarkan pada hal yang berbeda, dimana Renstra Kementerian Kehutanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, sesuai dengan masa jabatan presiden, sedangkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019, sesuai dengan masa jabatan Gubernur Riau.

Demikian juga halnya dengan Renstra SKPD kabupaten/kota yang menangani urusan bidang kehutanan, juga disusun sesuai dengan masa jabatan bupati/walikota

setempat, dimana di Provinsi Riau terdapat 12 kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya juga berbeda-beda.

Disamping masalah Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang menangani urusan bidang kehutanan, Renstra SKPD Provinsi Riau juga harus memperhatikan RTRW Provinsi Riau, dimana RTRW Provinsi Riau sampai dengan saat ini masih dalam proses penetapan.

Namun demikian berdasarkan telaahan dari Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang menangani urusan kehutanan di Provinsi Riau, terdapat beberapa program dan kegiatan yang saling mendukung untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan, kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau, terutama dalam upaya peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, melalui :

1. Pemantapan kawasan hutan, Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
2. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS),
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan,
4. Optimalisasi pemanfaatan hutan dan revitalisasi industri kehutanan,
5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,
6. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan
7. Penguatan kelembagaan kehutanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil identifikasi capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Hasil identifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan SKPD yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

3.1.1. Luasnya Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis

Provinsi Riau dianugerahi sumber daya hutan seluas 4.182.358,99 Ha yang terdiri dari hutan lindung (22.793,82 Ha), hutan suaka alam (531.852,65 Ha), hutan produksi terbatas (1.815.949,74 Ha) dan hutan produksi tetap (1.605.762,78 Ha). Namun sumber daya hutan yang menjadi nadi kehidupan ini belum dikelola secara optimal. Permasalahan kehutanan saat ini telah bergeser dari semula berupa pencurian hasil htan illegal (*illegal logging*), menjadi perambahan kawasan hutan dan penguasaan lahan. Kegiatan ini menimbulkan kerusakan hutan dan menyebabkan lahan kritis. Kegiatan tersebut terjadi tidak hanya pada kawasan hutan produksi, bahkan telah merambah pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam. Kerusakan hutan dikawasan hutan lindung dan hutan suaka alam akibat illegal logging, perambahan kawasan, penguasaan lahan, kebakaran hutan, pada hutan lindung dan hutan suaka alam masing-masingnya seluas 103.936,82 Ha dan 22.273,65 Ha.

Kerusakan hutan di kawasan hutan produksi terbatas dan tetap ternyata lebih luas lagi, masing-masingnya seluas 551.369,74 Ha dan 859.073,78 Ha. Pada tahun 2013, total luasan kerusakan kawasan hutan seluas 1.536.653,99 Ha atau sekitar 36,74 % dari total luasan hutan Provinsi Raiau. Kondisi ini disebabkan tidak jelasnya batas kawasan hutan di lapangan, karena telah hilang dan rusak, lemahnya pengawasan dan penegakan hokum. Disisi lain, kemampuan rehabilitasi hutan dan lahan kritis cenderung semakin menurun, karena hutan dan lahan kritis yang akan direhabilitasi tersebut telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2009, rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 275,28 ribu hektar turun menjadi 95 ribu hektar pada tahun 2013.

Gambar 3.1
Sebaran Titik Api (Hot Spot) pada Daerah Rawan Kebakaran Provinsi Riau

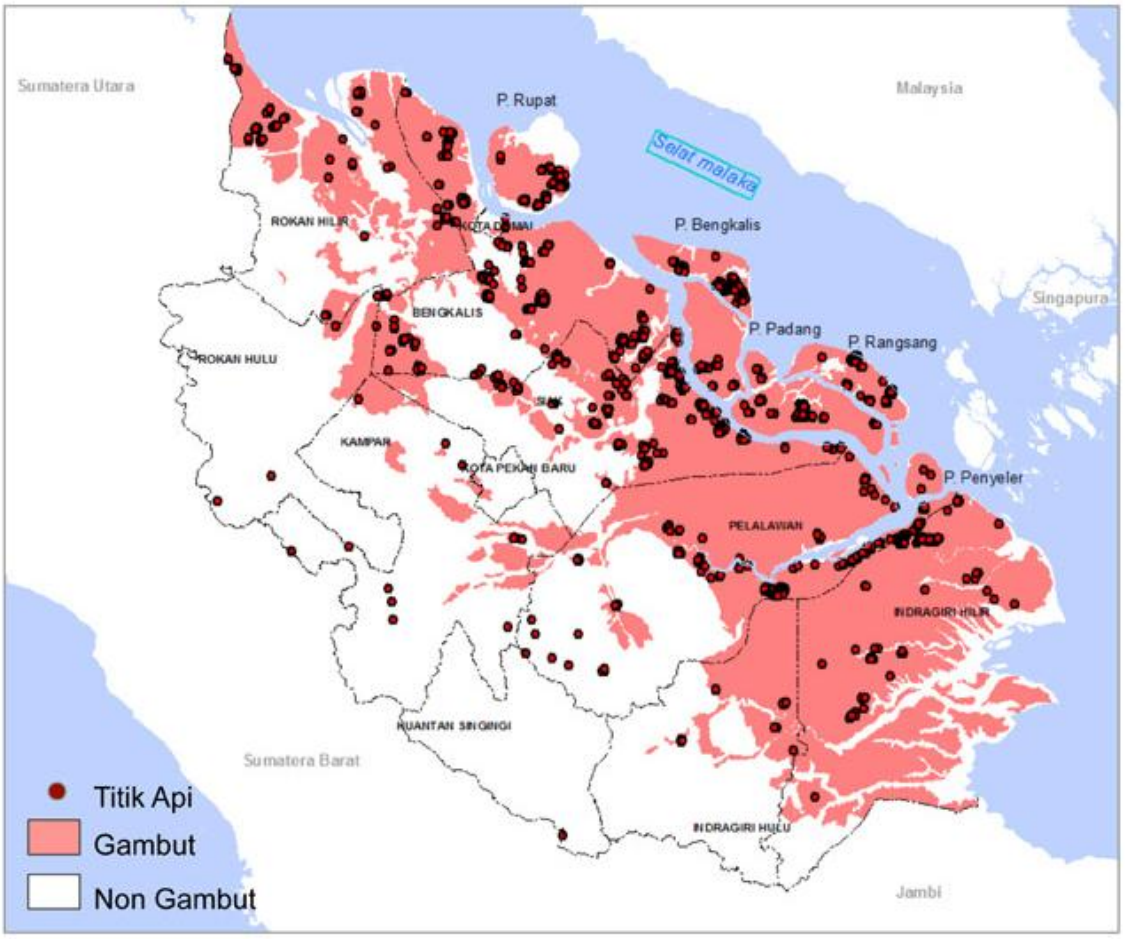

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2014

3.1.2. Kerentanan terhadap bencana Banjir

Hutan mempunyai peran penting sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan seperti *illegal logging*, perambahan kawasan, okupasi lahan, kebakaran hutan dan penyerobotan kawasan hutan menjadikan peran hutan semakin berkurang. Kondisi ini diperparah oleh perubahan cuaca ekstrim, sebagai dampak dari "pemanasan global". Pada musim hujan, hari hujan meningkat hingga 200 hari pertahun dan curah hujan hingga 4.080 mm/tahun. Kondisi hari hujan dan curah hujan yang tinggi dengan fungsi hutan yang semakin menurun menjadikan Provinsi Riau terus dilanda bencana banjir. Frekuensi bencana banjir dan jumlah jiwa menderita cenderung meningkat. Pada tahun 2011, frekuwnsi banjir sebanyak 12 kali, meningkat menjadi 27 kali pada tahun 2012. Jumlah jiwa menderita meningkat dari 7.669 jiwa menjadi 16.134 jiwa.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kehutanan Provinsi Riau

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Luasnya Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis					
a. Hutan Lindung b. Suaka Alam c. Hutan Produksi Terbatas d. Hutan Produksi Tetap	103.936,82 Ha 22.273,65 Ha 551.369,74 Ha 859.073,78 Ha	Luas Penutupan Hutan	a. Kemampuan personil terbatas b. Batas Kawasan yang tidak jelas di lapangan	a. Kebutuhan akan lahan usaha dan pemukiman masyarakat semakin meningkat, b. RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan.	a. Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang masih miskin dan belum memperoleh akses dalam pemanfaatan hutan. b. Pertumbuhan ekonomi masih rendah, sehingga perlu mengoptimalkan peran badan usaha kehutanan dan mengembangkan dan dan informasi kehutanan
Kerentanan terhadap bencana Banjir a. Frekuensi Banjir b. Jumlah penduduk yang terkena dampak	27 Kali 16.134 jiwa	Banjir yang terjadi tidak berdampak pada kerugian materiil	Dana reboisasi dan rehabilitasi hutan tidak memadai, sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak maksimal.	Alokasi DBH-SDH Dana Reboisasi di Kabupaten/kota belum dimanfaatkan secara maksimal.	Efektifitas dan integritas pemerintah belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 20014–2019 sebagai berikut :

"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur"

Pencapaian yang ingin diwujudkan melalui pokok-pokok visi diatas adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi melalui pelayanan dasar yang berkualitas, infrastruktur yang memadai serta pembangunan berkelanjutan dengan aparatur yang handal.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki , maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau 2014–2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. **Menurunkankan kemiskinan**
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa serta pemantapan kehidupan politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. **Meningkatkan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup serta pariwisata**
9. **Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan**

Dari 9 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 tersebut, urusan bidang kehutanan utamanya termasuk dalam misi ke delapan yaitu **meningkatkan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup serta pariwisata**, namun demikian dalam rangka menyukseskan Visi Guberbur Riau, Dinas Kehutanan juga menjalankan Misi ke-4 dan 9, yaitu : (4) **Menurunkankan kemiskinan, (9) Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.**

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedelapan, "**meningkatkan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup serta pariwisata**," dirumuskan kebijakan pada melaksanakan pemulihan dan konservasi sumber daya air, hutan, lahan, ekosistem pesisir dan laut dengan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang menjadi prioritas kedelapan dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikasi rencana program untuk tahun 2014-2019 dijabarkan pada setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

a. NON URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan
2. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan
3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
8. Program Perencanaan dan Pengembangan Baton
9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
10. Program Pengembangan Data dan Informasi
11. Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri
12. Program Optimalisasi Peran Badan Usaha Bidang Kehutanan Dalam Pembangunan

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014–2019, adalah sebagai berikut:

a). Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada periodisasi pelaksanaan RPJMD 2009–2013 yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, sarana dan prasarana pemerintahan, meningkatkan kapasitas aparatur serta peingkatan kesejahteraan rakyat.

b). Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahu kedua pelaksanaan RPJMD 2014 -2019, kebijakan yang dilakukan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mencakup Pendidikan, kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan masyarakat dan akses terhadap perumahan yang layak bagi rumah tangga miskin, penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi industri pertanian dan perkebunan, pariwisata serta penguatan peran swasta dalam pembangunan. Fokus pembangunan tahun 2015 yaitu *pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pemerintahan serta penguatan ekonomi inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat*.

c). Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2014–2019, pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau selain dari melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya lebih difokuskan pada pengembangan budaya, peran serta masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan seda, peningkatan peran pemuda dan pembinaan prestasi. Reformasi birokrasi secara menyeluruh terus dilanjutkan dalam semua aspek pemerintahan daerah. Arah kebijakan difokuskan kepada *pengembangan budaya, peningkatan prestasi penguatan aparatur pemerintahan dan pemantapan pembangunan ekonomi, serta melanjutkan kebijakan tahun sebelumnyansesuai dengan target yag telah ditetapkan*.

d). Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat dilaksanakan untuk melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya serta memantapkan capaianpembangunan yang telah dilaksanakan dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan dalam periode pembangunan tahun kedua dan ketiga dengan tetap menekankan pada *pemantapan infrastruktur dan aparatur pemerintahan dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya*.

e). Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2018)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014–2019 selain dari pada melanjutkan arah kebijakan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya yang merupakan tahap pemantapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada pencapaian target yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya berdasrkan hasil pengendalian dan evalusi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan yang perlu dipercepat pencapaiannya dengan focus *pemantapan pembangunan SDM, perekonomian berkelanjutan dan aparatur pemerintahan dengan menyelesaikan target kebijakan tahun sebelumnya*.

Arah kebijakan kewilayah selama 5 (lima) sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014–2019, yang terkait dengan bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

a). Kawasan Kritis

Kawasan-kawasan kritis ini merupakan kawasan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang telah mengalami kerusakan akibat kegiatan budidaya yang tidak terkendali di lapangan. Kawasan kritis terdapat di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Prioritas penanganan kawasan-kawasan kritis perlu dilakukan segera dalam jangka pendek dan menengah untuk menghindarkan dampak negatif lanjut yang lebih parah terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah. Kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori ini adalah: kawasan-kawasan perkebunan yang mengalami interusi air laut di pantai Timur Kab . Indragiri Hilir, Kawasan Bukit Betabuh, kawasan sekitar waduk koto panjang (*Catchment Area*), Kawasan sekitar Sungai Mahato Kiri. Selain itu, beberapa kawasan lindung juga mengalami permasalahan penebangan kayu illegal, yang walaupun belum sampai pada tahap kritis namun bila tidak diprioritaskan penanganannya akan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah yaitu: TN Bukit Tiga Puluh, SM Kerumutan, SM Bukit Rimbang – Bukit Baling, SM Giam Siak Kecil, CA Bukit Bungkuk, SM BAlai Raja dan SM Bukit Batu.

b). Kawasan Rawan Bencana Alam

Bencana alam yang potensial mengancam sejumlah kawasan di wilayah Riau adalah banjir yang terjadi hampir setiap tahun di musim penghujan. Kawasan-kawasan yang potensial mengalami banjir adalah pada tanah-tanah grup *alluvial* sepanjang sungai-sungai besar (Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Rokan), terutama pada dataran-dataran bantaran sungai yang memiliki *meander kompleks*. Di Sungai Indragiri dan Sungai Kampar banjir ini juga dipengaruhi oleh pasang naik air laut (bono) yang tinggi, yang menimbulkan luapan banjir lebih besar pada kawasan pertemuan antara air sungai dari hulu dengan air laut dari arah hilir. Prioritas penanganan kawasan-kawasan rawan bencana banjir ini perlu dilakukan secara terus menerus dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk menghindarkan berbagai dampak negatif merugikan yang bisa timbul, baik berupa harta benda, jiwa, maupun rusaknya kawasan-kawasan produksi milik penduduk.

c). Kawasan Perbatasan

Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Barat dan dengan Provinsi Jambi di sebelah Selatan. Di wilayah kelautan, Provinsi Riau berbatasan denngan Negara tetangga Malaysia dan Singapura di sebelah Utara dan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah Timur. Di perbatasan wilayah darat, khususnya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang umumnya didominasi oleh kawasan berfungsi lindung, pengelolaan kawasan memerlukan koordinasi dan penanganan yang bersifat lintas provinsi. Sebagai kesatuan ekosistem DAS (utamanya pada DAS Indragiri dan DAS Kampar), pengelolaan kawasan hulu-hulu sungai di Provinsi tetangga yang tidak terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik akan berdampak negatif bagi Riau sebagai wilayah hilir, meskipun telah dilakukan pengelolaan yang baik di kawasan-kawasan perbatasan Provinsi Riau sekalipun.

Di wilayah lautan, perbatasan laut Negara yang memanjang dari selat Malaka dan perairan Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan dengan aneka kegiatan laut yang cukup sibuk, antara lain untuk : alur pelayaran nasional maupun internasional, kegiatan pertambangan lepas pantai, kawasan penangkapan ikan, dan sebagai zona pertahanan keamanan. Disamping itu, perbatasan laut juga merupakan kawasan yang potensial rawan penyelundupan dan pencurian ikan. Atas dasar ini maka kawasan perbatasan laut Negara dikategorikan sebagai kawasan prioritas, yang penanganannya juga perlu dilakukan secara terus menerus dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Arah Kebijakan untuk Bidang Kehutanan (RPJMD 2014-2019), adalah menudukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau dengan mengacu pada RPJM Nasional dan memperhatikan target-target pada *Millennium Development Goals* (MDGs) serta mendukung kebijakan program MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*).

Sehubungan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Riau untuk bidang Kehutanan diwujudkan melalui pendekatan adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan kritis, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, dan pengendalian kualitas lingkungan, dengan tujuan, sasaran dan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8.4	Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Melaksanakan rehabilitasi konservasi dan perlindungan hutan dan lahan sesuai dengan peruntukannya	Melaksanakan pemulihan dan konservasi sumber daya air, hutan, lahan, ekosistem pesisir dan laut dengan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

Terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Sedangkan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: ***"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur".***				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Misi 4. **Menurunkankan kemiskinan** 1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan 2. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat sekitar hutan	Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang masih miskin dan belum memperoleh akses dalam mengembangkan usahanya.	Banyaknya masyarakat desa di sekitar hutan dan sangat sulit akses menuju desa-desa tersebut.	Masyarakat desa sekiatar hutan merupakan potensi untuk menjaga dan mengamankan kawasan hutan.

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Misi 8. **Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata** 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 3. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 4. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kerusakan hutan akibat tindak pidana kehutanan, seperti illegal logging, perambahan hutan, okupasi lahan, dan kebakaran hutan	1. Penanganan masalah tindak pidana kehutanan, masih lemah. 2. Tata batas kawasan hutan belum selesai dilaksanakan, karena belum ditetapkannya RTRW Provinsi Riau, sehingga sering terjadinya konflik lahan dan penyerobotan lahan.	1. Kapasitas tenaga polisi & PPNS kehutanan dan masyarakat /lembaga masyarakatt peduli hutan dalam upaya penanganan masalah kehutanan perlu ditingkatkan. 2. Percepatan pengesahan RTRW Provinsi Riau, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Riau.
	5. Program perencanaan dan pengembangan baton 6. Program perencanaan dan pengembangan kehutanan 7. Program pengembangan data / informasi 8. Program pemanfaatan kawasan baton industri		3. Diversi hasil hutan olahan dan pengembangan industri kecil belum maksimal dilaksanakan. 4. Keberadaan lembaga masyarakat di sekitar hutan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan usahanya. 5. Kegiatan rehabilitasi hutan belum maksimal dilaksanakan. 6. Kawasan hutan belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum meberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan.	3. Diversifikasi hasil hutan olahan dan pengembangan industri kecil kehutanan. 4. Pemberdayaan lembaga masyakat di sekitar hutan. 5. Mendorong Kabupaten/ Kota dalam memanfaatkan DBH-SDA Dana Reboisasi, untuk kegiatan pemulihan kerusakan hutan. 6. Memanfaatkan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan perlindungan hutan
3	Misi 9. **Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan** Program Optimalisasi peran badan Usaha bidang Kehutanan dalam pembangunan	Pertumbuhan ekonomi masih rendah, sehingga perlu mengoptimalkan peran badan usaha kehutanan dan mengembangkan dan informasi kehutanan	Belum optimalnya peran badan usaha kehutanan dalam pembangunan dan kurangnya data dan informasi terkait dengan upaya badan usaha kehutanan dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah	Banyaknya badan usaha kehutanan merupakan potensi yang cukup besar dalam upaya meningkatkan dan percepatan pembangunan daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.	Kegiatan penataan batas belum dapat dilaksanakan	RTRW Provinsi belum ditetapkan	Batas kawasan hutan di lapangan tidak jelas
2	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH	Kantor KPH mensyaratkan harus berada di lahan yang bersertifikat	Lahan bersertifikat berada d luar wilayah KPH	Kantor dan Sarpras KPH dibantu oleh Pemerintah Pusat (Kemenhut)
3	Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul	Data dan informasi sumberdaya hutan belum tersedia secara online	Perlu persiapan personil terampil dan sarpras yang memadai	Adanya dukungan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dari pemerintah provinsi
4	Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha	Areal hutan tanaman banyak dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Perlu areal clear & clean untuk perluasan hutan tanaman	Meningkatnya kebutuhan kayu untuk bahan baku industri dan kebutuhan lokal
5	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA)* seluas 2,5 juta ha	Penerbitan ijin usaha sangat tergantung dari kondisi areal yang direstorasi.	Areal bekas tebangan (LOA) banyak dirambah dan dikuasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Adanya investor yang berminat memenfaatkan LOA untuk direstorasi
6	Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%	Perlu persyaratan yang cukup ketat untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu	Perlu kepastian dan kenyamanan usaha	Memudahkan pemasaran hasil hutan yang bersertifikat
7	Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlifetrafikcing*	Perlu peningkatan upaya-upaya preventif untuk menurunkan jumlah hot spot dan kejadian kebakaran hutan	Kondisi fisik tanah ± 60% bergambut, mudah terbakar ketika musim kemarau tiba.	Melibatkan badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan			
8	Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar	Potensi taman nasional dan kawasan konservasi belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal	Kuranganya promosi baik melalui media cetak, elektronik maupun lembaga konservasi dan pariwisata alam	Kekayaan biodiversity dan ekosistem taman nasional dan kawasan konservasi.
9	Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas	Pengelolaan DAS belum terpadu dengan instansi terkait dan daerah hulu-hilir	Kurangnya koordinasi dan belum optimalnya Forum DAS	Keterpaduan program dan kegiatan antar instansi terkait dan daerah hulu-hilir
10	Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar	Kegiatandan alokasi anggaran rehabilitasi terbatas	Lahan kritis yang akan direhabilitasi dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Alokasi DBH-SDA Dana Reboisasi di kabupaten/kota cukup besar
11	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.	Minimnya minat pengelolaan Hkm di Provinsi Riau	Kepastian usaha dan areal untuk pengelolaan Hkm belum jelas	Alokasi areal calon Hkm
12	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.	Hutan desa belum dikelola secara maksimal	Belum semua hutan desa ditetapkan.	Kondisi hutan desa lebih baik dan lebih arif dalam pengelolaannya
13	Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.	Belum optimalnya penerapan teknologi dasar dan system silvikultur untuk mendukung pengelolaan hutan lestari	Perlu penelitian dan uji coba yang cukup lama untuk penerapan teknologi dasar dan system silvikultur	Sistem pengelolaan hutan lestari telah dimulai dengan pembentukan wilayah pengelolaan di tingkat tapak
14	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.	Hasil pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan belum dimanfaatkan secara maksimal di lapangan dan tempat kerja	Penempatan personil belum sepenuhnya berdasarkan kopentensi aparatur kehutanan	Tersedianya aparatur kehutanan yang handal dan terpercaya
15	Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul	Banyaknya regulasi di bidang kehutanan dan sering kali berubah	Penerapan regulasi sering terlambat dan kurang informasi	Regulasi yang mantap dan berkelanjutan
16	Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.	Pertanggungjawaban laporan keuangan sering terlambat/tidak tepat waktu	Kapasitas dan kemampuan personil masih rendah dan terbatas	Jumlah aparatur yang cukup
17	Penyelenggaraan reformasi	Pemahaman tentang	Reformasi birokrasi	Tersedianya pusat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	birokrasi dan tata kelola, 1 paket	reformasi birokrasi perlu terus ditingkatkan	belum berjalan maksimal	informasi dan pelayanan terpadu

Terkait dengan sasaran-sasaran tersebut dan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Kehutanan provinsi Riau dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penataan batas kawasan hutan di Provinsi Riau telah selsai 95,00%, namun demikian baru 11,3% yang telah ditetapkan Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan, sedangkan kewenangan penataan batas adalah BPKH wilayah XIX Pekanbaru.
2. Dalam rangka pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Riau telah diusulkan untuk 33 unit KPH, dan 3 Unit KPH Model telah terbentuk kelembagaannya.
3. Penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan Provinsi Riau telah tersedia sebanyak 3 judul, yaitu Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik Kehutanan dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
4. Terhadap penambahan areal tanaman pada hutan tanaman, saat ini telah beroperasi 64 IUPHHK-HT, dengan luas konsesi 1.745.762 Ha.
5. Terkait dengan penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA),* telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan untuk diterbitkan perijinannya.
6. Dalam rangka sertifikasi legalitas kayu telah mendorong para pemegang ijin IPHHK untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu.
7. Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan telah diupayakan melalui koordinasi dengan berbagai pihak dalam forum Rapat Koordinasi Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan pembentukan Satgas-Satgas Kebakaran hutan di kabupaten/kota, dan untuk pencegahan konflik lahan, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* mendorong para pemegang IUPHHK-HT untuk segera melakukan penataan batas areal kerjanya.
8. Pengembangan biodiversitas dan ekosistem pada kawasan konservasi telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Sultan Syarf Hasyim Minas, sebagai institusi pengelola Tahura.
9. Penyusunan rencana pengelolaan DAS secara terpadu telah dilaksanakan bekerjasama dengan BPDAS Indragiri Rokan.
10. Peningkatan tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas perlu didorong dengan memanfaatkan DAK Bidang Kehutanan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Riau saat ini belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya minat dari masyarakat untuk mengelola hutan kemasyarakatan.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa telah dilakukan melalui dana dekonsentrasi dari Ditjen BPDAS-PS Kementerian Kehutanan.

13. Pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi dilakukan terhadap areal IUPHHK-HA/HT untuk mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 64 unit.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan, peningkatan usaha masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan oleh UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan.
15. Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau bidang kehutanan telah diusulkan dan dalam proses penetapan oleh legislatif, berupa retribusi pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasyim, 1 judul.
16. Tertib admnistrasi dan penyusunan laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau perlu disusun dengan baik dalam rangka mempertahankan opini "wajar tanpa pengecualian".
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, dilaksanakan dengan penyediaan Pusat Informasi dan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 1 unit.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kehutanan/Yang Menangani Urusan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan/Yang Menangani Urusan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan/Yang Menangani Urusan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Percepatan Penetapan Kawasan hutan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	Adanya standar ganda dalam acuan pemanfaatan kawasan hutan	RTRW Provinsi belum ditetapkan	Kepastian areal pemanfaatan kawasan hutan di lapangan semakin jelas
2	Pembentukan Wilayah dan kelembagaan Pengelolaan Hutan Lestari di Tingkat Tapak (KPH)	Belum semua kabupaten/kota merespon kebijakan Pemabngunan KPH	Masih adanya keraguan dari kabupaten/kota dalam pembentukkan KPH	Kebijakan Nasional "No KPH No Budget"
3	Pengembangan Sistem Informasi sumberdaya hutan	Komunikasi data dan informasi sumberdaya hutan belum tersedia secara online	Personil terampil dan sarpras yang memadai belum tersedia	Dukungan kebijakan dan pendanaan pemanfaatan teknologi informasi
4	Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal	Masih terdapat areal hutan yang belum dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Perlu areal clear & clean untuk kelestarian usaha	Meningkatnya kebutuhan kayu untuk bahan baku industri dan kebutuhan local

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Produk industri hasil hutan yang bersertifikat dan legalitas kayu meningkat	Kebijakan sertifikasi legalitas kayu perlu persyaratan yang cukup ketat	Perlu kepastian dan kelestarian usaha	Memudahkan dalam pemasaran hasil hutan yang legal dan bersertifikat
6	Menurunkan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan pencegahan perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan konflik lahan	Perlu peningkatan upaya-upaya preventif untuk menurunkan jumlah hot spot, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan konflik lahan	Kondisi tanah sebagian besar (± 60%) bergambut, mudah terbakar ketika musim kemarau tiba.	Melibatkan badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan kebkaran hutan, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan konflik lahan
7	Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis terus ditingkatkan	Kegiatandan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis tidak dapat berjalan maksimal	Lahan kritis yang akan direhabilitasi dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengoptimalkan pemanfaatan DBH-SDA Dana Reboisasi di kabupaten/kota untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis

Terkait dengan sasaran-sasaran tersebut dan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Kehutanan provinsi Riau dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan perlu terus dilakukan untuk memberikan batas yang jelas di lapangan serta dan mendorong badan usaha kehutanan untuk segera menyelesaikan penataan batas areal kerjanya dalam rangka pencegahan konflik lahan, perambahan kawasan hutan dan *illegal logging*.
2. Perlu mendorong kabupaten/kota untuk pembentukan wilayah pengelolaan hutan lestaria di tingkat tapak (KPH) dan pemebentukan kelembagaannya.
3. Penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan yang *up to date* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan produksi dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalam pemafaatan hasil hutan.
5. Sertifikasi legalitas kayu terus ditingkatkan dan mendorong badan usaha kehutanan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu.
6. Pembangunan posko terpadu pencegahan perambahan hutan dan Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta pembentukan Satgas-Satgas Perambahan dan Kebakaran hutan di kabupaten/kota.
7. Peningkatan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dengan memanfaatkan DBH-SDH Dana Reboisasi di Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 perlu mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, dengan cara membandingkan rencana tata ruang dengan kondisi eksisting, selanjutnya mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2014-2019 harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, perlu segera dilaksanakan sehingga tidak terjadi standar ganda dalam kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Riau. Provinsi Riau melalui Revisi RTRW telah membuat **skenario hijau** (***Riau Green Scenario***) guna mengembalikan kawasan lindung mengantisipasi pemanasan global, dengan mengembalikan fungsi hutan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti hulu sungai sebagai resapan air harus menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan merekomendasikan tanaman tertentu (kayu-kayuan) sebagai tanaman sela pada perkebunan kelapa sawit

Proses penyusunan RTRW Provinsi Riau telah dimulai sejak tahun 1991, dengan kegiatan Penyusunan Awal RTRWP Riau. Selanjutnya pada tahun 1994 telah disahkan sebagai Perda No. 10/1994 tanpa melalui proses paduserasi dengan TGHK. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan terjadi Revisi I terkait substansi UU No.24/1992 dan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan tahun 2004 terjadi Revisi II terkait Pemekaran Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2008 dilakukan Penyesuaian substansi UU No.26/2007, PP No.26/2008 Proses Awal Paduserasi di Kementerian Kehutanan dan pada tahun 2011 telah memasuki Tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan RI dan Evaluasi substansi di Kementerian PU RI. Selanjutnya memasuki tahun 2012 merupakan tahapan penyelesaian RTRW Provinsi Riau, dimana saat ini draft RTRW Provinsi Riau, menunggu persetujuan substansi di Kementerian Pekerjaan Umum RI (BKPRN) dan persetujuan substansi di Kementerian Kehutanan RI (paduserasi kawasan hutan), untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau di Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil akhir evaluasi tersebut sebagai bahan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Riau, setelah melalui pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Riau di DPRD Provinsi Riau.

Substansi yang menjadi pembahasan dalam paduserasi pola ruang TGHK dan RTRWP Riau, adalah sebagai berikut :

1. Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (dari Kawasan Hutan menjadi Non Hutan (APL) dengan usulan/GAP lebih kurang 3,5 juta Ha);
2. Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (misal dari Hutan Produksi (HP) menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan seterusny dengan usulan lebih kurang 513.000 Ha)

Beberapa permasalahan di dalam proses paduserasi TGHK dan RTRWP Riau adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya desa-desa tua yang berada pada kawasan hutan, baik Kawasan Konservasi, Hutan Lindung maupun Hutan Produksi/Areal Konsesi;
2. Terdapatnya beberapa infrastruktur strategis yang dibangun didalam kawasan hutan
3. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan kawasan baik antara lahan garapan masyarakat dengan perusahaan, maupun antar perusahaan (kehutanan dengan perkebunan);
4. Kondisi eksisting kawasan hutan yang telah menjadi permukiman, lahan garapan masyarakat dan perkebunan sawit.

Pada tanggal 9 Agustus 2014 Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan atas RTRW Provinsi Riau,namun demikian masih ada beberapa wilayah yang belum terakomodir dalam persetujuan tersebut.

Tabel 3.6

Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai TGHK (update s/d Tahun 2012)

NO	FUNGSI	LUAS (HA)	%
1	Hutan Suaka Alam/Taman Wisata	531,852.65	6.19
2	Hutan lindung	228,793.82	2.66
3	Hutan Produksi		
	- Tetap	1,605,762.78	18.67
	- Terbatas	1,815,949.74	21.12
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.913.136,00	22.25
5	Hutan Mangrove/Bakau	138,433.62	1.61
6	Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan	1.913.136,00	22,25
	Jumlah	8,598,757.00	100.00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Laporan Tahunan, 2013)

Tabel 3.7

Berdasarkan RTRWP, Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994

No.	PERUNTUKAN	LUAS (Ha)	(%)
1.	Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan	2.872.491	33,41
2.	Hutan Lindung	161.823	1,88
3.	Kawasan Lindung Gambut	830.235	9,66
4.	Cagar Alam / SA/SM	570.412	6,63
5.	Kaw. Sekitar Waduk / Danau	20.024	0,23
6.	Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemungkiman dan Penggunaan Lain (Non Kehutanan)	4.143.772	48,19
	Jumlah	**8.598.757**	**100**

Hasil indentifikasi tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Non Hutan	Kawasan Hutan	Paduserasi pola ruang TGHK dan RTRWP Riau	Tidak terjadi standar ganda dalam kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang	Pelayanan yang terkait dengan pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan baik
2	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi (HP)	Kawasan Hutan Produksi	Mengakomodir perubahan fungsi kawasan hutan	Pemenuhan kebutuhan lahan di luar bidang	Pemenuhan kebutuhan lahan di luar bidang kehutanan

	menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)		dalam RTRW Provinsi Riau	kehutanan menjadi terkendala	dapat dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang saat ini dalam proses penyempurnaan, perwujudan tata ruang wilayah mengindikasikan adanya disparitas perkembangan dan pembangunan antara wilayah Riau bagian Utara, Tengah dengan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan pedesaan; antara kawasan pantai timur dengan kawasan barat. Wujud kesenjangan tata ruang wilayah tersebut antara lain karena belum berfungsinya pusat-pusat pertumbuhan yang belum berkembang secara hirarkis serta kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana wilayah.

Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan secara lebih seimbang dan proporsional yang dalam struktur keruangan terwakili oleh keberadaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta sub-sub PKL yang didukung oleh prasarana transportasi yang berhirarki menurut fungsi arteri, kolektor dan lokal. Dalam konteks tersebut kota Pekanbaru tetap berfungsi sebagai PKN yaitu pusat utama untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa dan kepariwisataan.

Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.Pemanfaatan ruang darat dan laut yang berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove dan kawasan terumbu karang dan padang lamun

Tabel 3.9

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi belum ditetapkan	Adanya standar ganda (TGHK dan RTRW) sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Riau	Adanya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Kebutuhan lahan dan kepastian usaha terkait pemanfaatan ruang semakin mendesak

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Perda No. 10 tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994, kawasan hutan Riau seluas 8.598.757 Ha (setelah dikurangi dengan Provinsi Kepulauan Riau), yang terdiri dari arahan

pengembangan kawasan kehutanan seluas 2.872.419 ha; kawasan lindung seluas 161.823 ha; kawasan lindung gambut seluas 830.235 ha; cagar alam/ suaka alam/ suaka margasatwa seluas 570.412 ha; kawasan sekitar danau dan waduk seluas 20.024 ha kawasan pengembangan perkebunan, transmigrasi, pemukiman dan penggunaan lain (non kehutanan) seluas 4.143.772 ha, merupakan arahan Kebijakan dan Startegi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Riau yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Hutan Provinsi Riau memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemic serta sebagian besar kekayaan tersebut berada dalam kawasan hutan. Potensi satwa yang dilindungi pada kawasan hutan Provinsi Riau tahun 2007 adalah 12 species yaitu Gajah, Harimau Sumatera, Harimau dahan, Beruang madu, Burung Enggang, Kuntul putih, Rusa, Lutung, Raja Udang, Siamang, Ikan arwana dan Elang Laut (BKSDA RIAU, *2013*). Namun keberadaan kekayaan tersebut saat ini sedang mengalami tekanan, sebagai akibat dari kegiatan *legal deforestation* seperti pembangunan perkebunan di areal konversi dan pembangunan hutan tanaman, dan *illegal deforestation* seperti perambahan hutan, pencurian kayu/ ilegal loging, kebakaran hutan dan perburuan liar.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi sebanyak 18 unit dengan luas 570.814,63 Ha (berdasarkan penafsiran Citra Landsat tahun 2007) yang terdiri dari 10 unit Suaka Margasatwa (SM) seluas 401.843,25 Ha, 1 unit Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga seluas 5.828,80 Ha, 1 unit Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim II seluas 6.130,84 Ha, 2 unit Hutan Wisata (HW) seluas 5.607,70 Ha, 2 unit Cagar Alam (CA) seluas 12.289,60 Ha dan 2 unit Taman Nasional (TN) seluas 139.114,44 Ha.

Kawasan hutan yang ada tersebut sampai dengan saat ini masih terus mendapat tekanan dari berbagai kepentingan sehingga terancam keberadaannya. Tekanan-tekanan tersebut berupa : klaim masyarakat adat, kurangnya pengakuan masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan, keinginan kuat sektor lain untuk mengkonversi kawasan hutan, rumitnya sinkronisasi penatagunaan hutan dalam proses review penataan ruang (RTRWP, RTRWK) serta banyak pal-pal batas yang merupakan hasil tata batas sudah hilang dan tidak ditemukan lagi di lapangan sehingga hal ini perlu ada rekonstruksi tata batas. Namun kegiatan rekonstruksi tidak dilakukan karena biaya cukup tinggi dan penataan batas masih dianggap sebagi biaya (*cost*) bukan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat TM tahun 2007, Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWP), luas dan kondisi kawasan hutan Provinsi Riau tahun 2013 terdiri dari kawasan hutan seluas 4.321.678,71 Ha dengan kondisi berhutan seluas 2.822.736,99 dan tidak berhutan/ lahan yang perlu direhabilitasi seluas 1.498.941,72 Ha.

Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukan oleh kejadian-kejadian antara lain : terjadinya bencana longsor, banjir, kekeringan, serta gangguan terhadap kawasan hutan berupa perambahan, kebakaran hutan, penebangan liar yang sampai saat ini masih berlangsung. Selain itu juga terdapat pengelolaan hutan yang mengabaikan aspek-aspek kelestarian. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar

dari sisi ekologi dan ekonomi, sekaligus sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan.

Kondisi yang diharapkan ke depan adalah terpeliharanya sistem penyangga kehidupan melalui pengelolaan setiap fungsi hutan dimana setiap fungsi penunjang dapat berjalan secara seimbang. Terpeliharanya sistem tersebut terindikasi pada kesehatan lingkungan (antara lain : Kemantapan tata air, rendahnya tingkat erosi dan polusi, berkembangnya kegiatan ekoturisme, dan termanfaatnya potensi keragaman hayati) bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kondisi ekologi yang diinginkan tersebut, dalam perencanaan jangka menengah perlu ditetapkan target kondisi ekologi sebagai berikut :

a. Penanganan yang nyata dalam pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati terhadap hal-hal antara lain : Penyelundupan satwa liar, hilangnya plasma nutfah, perburuan liar. Disamping meningkatnya perlindungan keanekaragaman hayati diharapkan meningkatnya pengembangan satwa yang dilindungi secara *in situ* dan *eks situ*. Termasuk meningkatnya penataan dan pengelolaan kawasan konservasi.
b. Penanganan yang nyata dalam upaya pemberantasan penebangan liar, perambahan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
c. Berkembangnya laju degradasi hutan yang diiringi dengan upaya perbaikan kondisi hutan, sehingga kawasan hutan yang kondisinya baik dan seimbang luasannya bertambah.
d. Sinkronisasi proses penatagunaan hutan dengan *review* penataan ruang (RTRWP, RTRWK) melalui komunikasi dan koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
e. Selesainya proses penunjukan kawasan hutan dengan demikian penunjukan kawasan hutan tersebut dapat menjadi acuan yang pasti bagi pengelolaan hutan lestari.
f. Selesainya proses penetapan kawasan hutan pada kawasan-kawasan hutan yang telah ditata batas sehingga keberadaan kawasan hutan tersebut diakui oleh semua pihak.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi masih banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan social dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihimpun dalam 3 aspek pembangunan yaitu (1) aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social, seni budaya, dan olah raga; (2) aspek pelayanan umum yang terdiri dari (a) urusan wajib meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan pilotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. (b) Urusan pilihan meliputi; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan ketransmigrasian. (3) aspek daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah / infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia.

Dari berbagai permasalahan pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan serta kondisi objektif yang ada, isu-isu strategis memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa datang, untuk itu maka isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau perlu dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek-aspek pembangunan daerah serta memperhatikan isu-isum global dan nasional. Berddasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lima tahun kedepan isu strategis Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan infrastruktur dan integrasi jaringan transportasi
b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
c. Pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja
d. Pengoptimalisasi pengembangan sector dan komoditas unggulan wilayah
e. Peningkatan pelayanan public, kualitas birokrasi dan tata kelola
f. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
g. Pembangunan budaya melayu dan kehidupan beragama
h. Peningkatan peran swasta, investasi dan optimalisasi peran kawasan strategis provinsi
i. Penanggulangan kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
j. Isu strategis lingkungan terkait dengan pengelolaan hutan, pencemaran air, tanah dan udara, efek gas rumah kaca, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan, bencana geologi, terjadinya kerusakan lahan di lahan gambut.
k. Peningkatan daya saing global
l. Peningkatan kemandirian pangan
m. Peningkatan ketahanan energi

Isu strategis dari faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Kehutanan kabupaten/kota, hasil telaahan RTRW dan hasil analisis KLHS**,** untuk bidang kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan pada masa lalu telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sumberdaya, telah terjadi *degradasi* dan *deforestasi* yang antara lain disebabkan oleh : pemanfaatan hutan yang tidak terkendali, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan tidak cukup nyata akibat adanya proses *marginalisasi* masyarakat sekitar hutan yang nampak dari kesenjangan dan kemiskinan.
2. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau merupakan masalah tahunan yang telah menjadi issu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan anggaran yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi kalau dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan. Sampai saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi, sedangkan perencanaan menyeluruh dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan.

3. Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya hutan saat ini, maka kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan kepada upaya-upaya :

   a. Mengelola sumberdaya hutan secara optimal melalui sistem pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan daya dukungnya;
   b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumberdaya hutan;
   c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara bertahap;
   d. memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   e. meninjau dan menyempurnakan system pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan indikator-indikator keberhasilan yang jelas;
   f. memelihara kawasan konservasi untuk berbagai keperluan; serta
   g. mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan kerusakan sumberdaya hutan.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis yang berkembang saat ini adalah bahwa permasalahan kehutanan saat ini telah bergeser dari semula berupa pencurian hasil hutan illegal (*illegal logingg*), menjadi perambahan kawasan hutan dan penguasaan lahan. Kawasan hutan yang telah dirambah dan dikuasai tersebut, kemudian dibersihkan dengan cara membakar, sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini menimbulkan kerusakan hutan dan menyebabkan lahan kritis. Kegiatan tersebut terjadi tidak hanya pada kawasan hutan produksi, bahkan telah merambah pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan funsgi SKPD.

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat".

Penetapan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau dilandasi :

- Bahwa kelestarian hutan menjadi prinsip bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta pengurusan hutan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diacu secara global, yaitu "*Sustainable Forest Development*".
- Bahwa keberadaan hutan yang terjaga kelestariannya mutlak harus ada karena merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan.
- Bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan, karena faktor kesejahteran sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan. Kesejahteraan masyarakat diperoleh sebagai akibat dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat yang diperoleh sabagai akibat dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hutan (*sense of belonging and sense of responsibility*).

4.1.2. Misi Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Dalam rangka mencapai visi untuk kurun waktu jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan

Misi ini bertujuan untuk :

Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan

2. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Misi ini bertujuan untuk :

1.Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP

1. Menurunkan luasan lahan kritis
2. Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan

4. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat
5. Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan

3. Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan

Misi ini bertujuan untuk :

1. Mempertahankan fungsi hutan
2. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural
3. Menertibkan penatausahaan bahan baku industri kehutanan

4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang berwawasan lingkungan

Misi ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau
3. Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
5. Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman
6. Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan
7. Mengoptimalkan kemitraan kehutanan

5. Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya

Misi ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan.
2. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi.
3. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan
4. Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
5. Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi
6. Memantapkan sistim jaringan data kehutanan provinsi

6. Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk :

1. Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan
2. Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pembangunan jangka menengah SKPD Dinas Kehutanan selama lima tahun ke depan adalah prakondisi kawasan hutan untuk mewujudkan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat.

4.1.3.1. Tujuan Jangka Menengah SKPD

Memperhatikan kondisi kehutanan saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan yang ada serta mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga dapat memperjelas penetapan program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan.

Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 20114-2019 adalah sebagai berikut :

MISI I : Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan

1. Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan

MISI II : Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP
2. Menurunkan luasan lahan kritis
3. Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
5. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat
6. Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan

MISI III : Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan

1. Mempertahankan fungsi hutan
2. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural
3. Menertibkan penatausahaan bahan baku industri kehutanan

MISI IV : Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau
3. Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
5. Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman
6. Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan

MISI V : Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya

1. Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan
2. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi
3. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP Minas Tahura
4. Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
5. Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi
6. Memantapkan sistim jaringan dan komunikasi data kehutanan provinsi

MISI VI : Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan

1. Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan
2. Meningkatnya peran serta badan usaha pada sektor kehutanan dalam pembangunan hutan yang lestari

4.1.3.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 20114-2019 adalah sebagai berikut :

MISI I : Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan

1. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

MISI II : Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Terwujudnya penutupan lahan kritis
2. Data dan informasi lahan kritis skala provinsi Riau tersedia sebanyak 1 paket
3. Peningkatan pembuatan tanaman pada lahan kritis seluas 250.000 ha
4. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm, HTR, HR, dll)
5. Menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat
6. Terbangunnya sumber benih tanaman kehutanan sebanyak 10 unit

MISI III : Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan

1. Terwujudnya penegakan hukum dalam dalam kasus bidang kehutanan
2. Terjaganya kawasan hutan dari perambahan, okupasi lahan dan illegal logging
3. Terwujudnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural
4. Mewujudkan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan
5. Terwujudnya pengawasan peredaran bibit
6. Terwujudnya pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan
7. Terwujudnya pengawasan terhadap pencadangan areal HTR
8. Terwujudnya pemahaman hukum masyarakat dalam pemanfaaatn hutan
9. Tercapainya tertib pemenuhan bahan baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MISI IV : Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor kawasan hutan KPHP Minas Tahura
2. Perhitungan stok karbon dari deforestasi dan degradasi hutan produksi Provinsi Riau
3. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif dan berwawasan lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat
4. Meningkatnya keragaman produk kehutanan bukan kayu atau HHBK

5. Meningkatkan kualitas pendampingan dari tenaga penyuluh kehutanan
6. Pengelolaan kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi pada 60 izin
7. Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & hutan produksi
8. Terlaksananya penyeimbangan secara bertahap suplai demand kayu
9. Terlaksananya tertib penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
10. Terwujudnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara optimal
11. Terwujudnya pengembangan kemitraan kehutanan secara optimal

MISI V : Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya

1. Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & produksi
2. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT
3. Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan
4. Tetibnya penyelenggaraan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan
5. Tertibnya Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan
6. Terinventarisasinya kawasan hutan
7. Tersusunnya rencana makro penyelenggaraan kehutanan provinsi, statistik, dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan
8. Menyamakan persepsi terhadap status kawasan KPHP Minas Tahura antar Para Pihak
9. Terwujudnya peningkatan kinerja dengan dukungan peralatan yang memadai
10. Terwujudnya data dan informasi kehutanan Provinsi yang berkualitas
11. Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem jaringan komunikasi data kehutanan

MISI VI : Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan

1. Terlaksananya program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdaya guna dan tepat sasaran bagi masyarakat
2. Meningkatnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi 1 : Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan								
1	Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan	1. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan	Terbentuknya lembaga masyarakat dalam kewirausahaan di sektor kehutanan	0	6	5	5	4
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan serta meningkatnya kemandirian lembaga usaha masyarakat berbasis kehutanan SDH (lembaga)	0	0	5	5	4
		2. Meningkatnya ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kehutanan bukan kayu atau HHBK (Pelatihan)	0	0	4	5	6
			Terbangunnya model usaha budidaya gaharu (Unit)	0	0	1	1	1
			Tercapainya pemahaman berbagai pihak baik pusat maupun daerah, antar instansi terkait, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan di Provinsi Riau (Kab/Kota)	7	0	7	7	7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja				
					2014	2015	2016	2017	2018
			Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat / swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat / swasta di sekitar wilayah KPHP Model Minas Tahura (kali)		0	0	4	5	6
			Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat / swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat / swasta di sekitar wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali)		0	0	4	5	6
			Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan (desa)		12	0	12	12	12
Misi 2 : Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan									
1	Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP		Terwujudnya penutupan lahan kritis	Peningkatan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana lokasi wisata alam Tahura SSH (Paket)	1	0	0	0	0
2	Menurunnya luasan lahan kritis		Data dan informasi rehabilitasi lahan kritis skala provinsi Riau tersedia sebanyak 1 paket	Terjaminnya kualitas data dan Peta sebaran lahan kritis di Provinsi Riau (Kab/Kota)	12	1	12	12	12
				Terciptanya peluang usaha pembibitan tanaman hutan dan MPTS					
				Teridentifikasinya areal tidak produktif serta terlaksananya pengayaan tanaman pada hutan produksi di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	0	40	40	40	40

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Terkumpulkannya benih unggulan dari berbagai daerah	0	0	10	10	10
			Terdatanya karakteristik DAS di Prov. Riau	0	0	1	1	1
			Mendorong kabupaten/ kota dalam pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan kota (lokasi)	0	12	12	12	12
			Terbangunnya unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat	0	0	2	2	2
			Tersusunnya rencana strategis, Renja SKPD, RKA_SKPD/KL dan DPA-SKPD dan informasi perencanaan Dinas Kehutanan (Dokumen)	0	5			
			Terselenggaranya rapat-rapat Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan (kali)	0	7			
			Tersusunnya Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Renstra, Data dan informs perencanaan Kehutanan (Dokumen)	0	6			
3	Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS	Peningkatan pembuatan tanaman pada lahan kritis seluas 250.000 ha	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di Kab/kota sesuai kaidah teknis yang ada (kab/kota)	12	12	12	12	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm,HTR, HR, dll)	Tersedianya bibit tanaman hutan untuk masyarakat					
			Terdatanya sumber benih di Provinsi Riau dengan baik (Kab/kota)	12	12	12	12	12
5	Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat	Menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat	Terbangunnya demplot model agroforestry yang sesuai dengan karakter lahan dan kondisi social ekonomi masyarakat provinsi Riau (ha)	2	4	4	4	4
			Rehabilitasi di kawasan TAHURA SSH serta peningkatan sarpras KPH dan pengamanan kawasan (Ha)	56	0	0	0	0
			Penanaman areal terbuka eks perambahan di kawasan KPHP Minas Tahura dan tersedianya sarpras KPHP Minas Tahura (Ha)	56	60	60	60	60
6	Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan	Terbangunnya sumber benih tanaman kehutanan sebanyak 10 unit	Terpeliharanya pusat pembibitan UPT BRKH di Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (lokasi)	1	1	1	1	1
			Tersedianya sarana dan prasarana, serta terpenuhinya bibit yang bermutu baik					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi 3 : Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan								
1	Mempertahankan fungsi hutan	Terwujudnya penegakan hukum dalam dalam kasus bidang kehutanan	Terdampinginya penyelesaian kasus pelanggaran hokum penyalahgunaan kawasan hutan di Provinsi Riau	30	30	30	30	30
		Terjaganya kawasan hutan dari perambahan, okupasi lahan dan illegal logging	Pengamanan secara preventif dan persuasive di seluruh Kawasan KPHP Model Minas Tahura (lokasi)	1	1	1	1	1
2	Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non procedural	Terwujudnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural	Meningkatnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan non procedural (operasi)	0	-	15	15	15
			Meningkatnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh illegal logging (operasi)	0	-	15	15	15
			Tertanganinya kasus tindak pidana kehutanan					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Terciptanya keamanan kawasan hutan dari pembalakan liar, perambahan, penertiban industry illegal, penguasaan lahan dan pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutann (operasi)	0	10	0	0	0
			Terlaksananya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (kab/kota)	12	12	12	12	12
			Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah rawan kebakaran hutan dalam penanggulangan kebakaran hutan (lokasi)	12	7	7	7	7
			Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja MPA sebagai regu pemagam kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan kompetensi aparatur dalam penanggulangan bencana hutan dan lahan berbasis masyarakat (orang)	30	60	60	60	60
			Peningkatan jumlah kader serta pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh kehutanan swadaya mandiri (PKSM) di Provinsi Riau (orang)	80	80	80	80	80
			Terjaminnya penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Kehutanan (kasus)	0	5	5	5	5
			Meningkatnya SDM Penyuluh kehutanan se- Provinsi Riau dan meningkatkan kompetensi SDM UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat					
			Tersedianya data kondisi hutan lindung serta tercapainya kesadaran dan timbulnya partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan hutan					
			Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Perlindungan Hutan di areal IUPHHK (izin)	36	45	54	65	78

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Terlaksananya penanaman pohon (kab/kota)	12	12	12	12	12
			Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan kehutanan (kali)	0	0	1	1	1
			Meningkatnya kesadaran akan fungsi hutan di masyarakat sekitar kawasan hutan yang berada pada areal KPHP Model Tasik Besar Serkap (desa)	4	5	5	5	5
			Terlaksananya kegiatan pengamanan perlindungan hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (izin)	0	5	5	5	5
			Terlaksananya penanganan konflik pada areal KPHP Model Tasik Besar Serkap (kasus)	0	4	5	6	7
			Terlaksananya pelatihan teknik pengamanan hutan partisipatif (angkatan)	0	0	4	4	5
			Terfasilitasi dan terbimbingnya pengamanan hutan adat/hak/desa skala provinsi (lokasi)	0	5	6	7	9
			Terbentuknya polisi kehutanan pola kemitraan (angkatan)	0	1	1	1	1
			Terlaksananya kampanye penyelamatan hutan Riau (kali)	0	5	6	7	9
			Meningkatnya pencegahan terhadap penyelewengan penggunaan izin pemanfaatan hutan (kasus)	0	0	2	2	2
			Terwujudnya fasilitasi terhadap konflik areal pemanfaatan hutan (kasus)	0	0	3	3	2
			Tersedianya sarana prasarana operasional polisi kehutanan (polhut) dan PPNS Kehutanan (unit)	0	4	4	4	4
			Tersedianya sarana mobilitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) (unit)	0	0	2	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Mewujudkan pengawasan illegal mining dalamkawasan hutan	Terlaksananya pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan (kasus)	0	0	3	3	2
		Terwujudnya pengawasan peredaran bibit	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit (kasus)	0	0	3	3	2
		Terwujudnya pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatkan pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan (kasus)	0	0	1	2	1
		Terwujudnya pengawasan terhadap pencadangan areal HTR	Terlaksananya pengawasan terhadap areal yang dicadangkan sebagai HTR (kasus)	0	0	1	2	1
		Terwujudnya pemahaman hokum masyarakat dalam pemanfaatan hutan	Meningkatnya kesadaran hokum masyarakat terhadap pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan melalui penyuluhan (desa)	0	0	6	6	6
			Meningkatnya keamanan sarana prasarana perlindungan hutan (patroli)	0	0	10	10	10
			Meningkatnya manfaat hutan lindung sesuai dengan fungsinya (lokasi)	4	0	4	4	4
	Menertibkan penatausahaan bahan baku kayu industry kehutanan	Tercapainya tertib pemenuhan bahan baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terselesaikannya kasus, saksi ahli, pengukuran dan pengujian bahan baku industri	0	0	2	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi 4 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan								
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor kawasan hutan KPHP Minas Tahura	Meningkatnya kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat sekitar kawasan KPHP Minas Tahura (desa)	0	0	4	4	2
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau	Perhitungan stok karbon dari deforestasi dan degradasi hutan produksi Provinsi Riau	Meningkatnya stok karbon dalam kawasan hutan (plot)	3	5	5	5	5
3	Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif dan berwawasan lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatkan kesadaran pengusaha hutan yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat	1	1	1	1	1
			Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan HTR, HKm Hutan Desa dan HHBK Unggulan Daerah (Kab/kota)	5	9	5	5	5
			Meningkatnya kinerja pengusahaan hutan alam / restorasi ekosistem dan meningkatnya tanggung jawab para pihak dalam penyempaian data produksi (unit)	4	4	0	0	0
			Tersedianya data potensi wisata alam jasa lingkungan, pendidikan dan penelitian KPHP Minas Tahura (lokasi)	1	1	0	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Data dan laporan penyelenggaraan perizinan dan penggunaan koridor (lokasi)	0	16	0	0	0
			Laporan hasil monitoring dan evaluasi perizinan pada KPHP Model Tasik Besar (izin)	0	17	0	0	0
			Tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan dan sumber daya hutan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (laporan)	0	1	1	1	1
4	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Meningkatnya keragaman produk kehutanan bukan kayu atau HHBK	Meningkatnya dan terbinanya unit usaa pemanfaatan HHBK serta pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu	1	0	1	1	1
		Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur penyuluh kehutanan sebagai tenaga pendamping masyarakat di lapangan	Terpenuhinya kebutuhan penyuluh masyarakat (PKSM) sekaligus meningkatkan pengetahuan di bidang kehutanan terutama potensi HHBK (orang)	0	80	80	80	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
5	Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman	Pengelolaan kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi pada 60 izin	Terkelolanya kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi (lokasi)	20	0	20	20	20
			Tersedianya infrastruktur dan fasilitas umum kawasan wisata alam KPHP Model Minas Tahura (lokasi)	0	1	1	1	1
			Termanfaatkannya areal yang tidak dibebani hak secara optimal (lokasi)	0	2	2	2	2
			Terlaksananya fasilitasi pembentukan KPHP / KPHL Provinsi Riau dan Kab/Kota (lokasi)	0	5	5	5	5
			Terlaksananya data dan informasi pelaksanaan tat batas luar areal IUPHHK-HT/HA	0	15			
		Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & hutan produksi	Memberikan batas yang jelas di lapangan (km)					
			Tersusunnya buku statistik dinas Kehutanan Provinsi Riau (judul)	0	1	0	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Tersedianya system jaringan informasi kehutanan (paket)	0	1	0	0	0
			Terkendalinya penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (lokasi)	0	15	0	0	0
			Tersedianya dokumen profil kehutanan provinsi (judul)					
			Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	0	15			
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (unit)	0	1			
			Terbentuknya Pengelolaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dengan melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (desa)	0	4			
			Meningkatnya pemahaman dan kapasitas kelembagaan KPHP Model Minas Tahura (desa)	0	4			
			Terlaksananya inventarisasi kawasan hutan lintas Kab/kota (ha)	0	30.000			
			Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	0	10			
			Tersedia dan terpeliharanya peralatan survey Dinas Kehutanan Provini Riau (unit)	0	85			
			Tersedianya citra satelit resolusi sedang (dokumen)	0	2			
			Memberikan batas kawasan KPHP Minas Tahura yang jelas di lapangan (km)					
			Tersedianya data dan informasi tentang batas areal perusahaan di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (unit)					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
6	Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan	Terlaksananya penyeimbangan secara bertahap suplai demand kayu	35 unit	30	35	35	35	35
		Terlaksananya tertib penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hail hutan	Terbinanya dan tertibnya penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan (unit)	43	55	55	60	60
		Terwujudnya penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) secara optimal	Tertata dan terselenggaranya penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak sektor kehutanan (kab./kota)	11	11	11	11	11
7	Mengoptimalkan kemitraan kehutanan	Terwujudnya pengembangan kemitraan kehutanan secara optimal	Tersedianya informasi minatkerjasama dengan masyarakat / swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat swasta di wilayah KPHP Model minas Tahura (kali)	0	3			
			Tersedianya informasi minatkerjasama dengan masyarakat / swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat swasta di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali)	0	3			
			Terbangunnya model usaha budidaya gaharu (unit)	0	1			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi 5 : Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya								
1	Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & produksi	Memberikan batas yg jelas di lapangan(km)	40	0	50	50	50
			Terbinanya pejabat penagih iuran kehutanan di Kab/kota (kali)	0	0	22	22	22
			Termonitornya pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan pembayaran IUPH, PSDH dan DR serta SPT rampung oleh wajib bayar (jumlah wajib bayar)	0	0	62	62	62
			Tersedianya data PNBP dan DBH sektor kehutanan, melalui rekonsiliasi dengan kab/kota dan kementerian (kali)	0	0	12	12	12
			Laporan Kegiatan industry serta optimalisasi HHK (kab/kota)	21	21	21	21	21
			Terpenuhinya bahan baku yang lestari bagi IPHHK	10	10	10	10	10
			Terpantaunya status IPHHK yang tidak aktif (kapsitas s/d 6.000 m3/tahun) (laporan)	0	10	10	10	10
			Tersosialisasnya system verifikasi legalitas kayu IPHHK kap > 2.000 s/d 6.000 m3/th (unit)	17	17	17	17	17
			Pembinaan dan penertiban supli bahan baku industri 30 unit	0	30	30	30	30
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan serta meningkatnya kemandirian lembaga usaha masyarakat berbasis kehutanan SDH (lembaga)					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kehutanan bukan kayu atau HHBK (pelatihan)	0	3			
			Tercapainya pemahaman berbagai pihak baik pusat maupun daerah, antar instansi terkait, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan di Provinsi Riau (kab/kota)					
		Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT	Terlaksanya monitoring dan evaluai penataan batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT (lokasi)	12	0	25	25	25
			Tersedianya data dan informasi tentang batas areal perusahaan di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar serkap (unit)	0	0	4	4	4
		Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan	Tertibnya kegiatan penggunaan kawasan hutan (unit)	9	0	10	11	11
			Terkendalinya penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (lokasi)	8	0	10	10	10

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Termonitornya izin pemanfaatan, penggunaan serta perizinan lainnya yang ada pada wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (izin)	9	0	17	17	17
		Tetibnya penyelenggaraan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan	Data dan laporan penyelenggaraan perizinan dan penggunaan koridor (lokasi)	19	-	15	15	15
		Tertibnya Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan	Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	11	0	15	12	13
		Terinventarisasinya kawasan hutan	Terlaksananya inventarisasi kawasan hutan lintas kab/kota	22,500	0	30,000	30,000	30,000
2	Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi	Tersusunnya rencana makro penyelenggaraan kehutanan provinsi, statistik, dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan	Tersedianya dokumen rencana makro kehutanan Provinsi Riau (judul)	0	-	-	-	1
			Terlaksananya fasilitasi pembentukan KPHP/KPHL Provinsi Riau dan Kab/kota (lokasi)	0	0	5	5	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
3	Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP Minas Tahura	Menyamakan persepsi terhadap status kawasan KPHP Minas Tahura antar Para Pihak	Memberikan batas kawasan KPHP Minas Tahura yang jelas di lapangan (km)	0	0	50	50	50
4	Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan	Terwujudnya peningkatan kinerja dengan dukungan peralatan yang memadai	Adanya peralatan ukur lapangan untuk kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau (unit)	4	0	100	115	125
			Tersedia dan terpeliharanya peralatan survey Dinas Kehutanan Provinsi Riau (unit)	69	0	75	80	80
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (unit)	1	0	2	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Tersedianya citra satelit resolusi sedang (dokumen)	2	0	2	2	2
			Peta penutupan vegetasi kawasan hutan provinsi Riau (kab/kota)	12	0	12	12	12
			Terlaksananya pembangunan kehutanan yang terencana dan tepat waktu (satker)	15	0	0	0	0
			Tersusunnya rencana dan program pembangunan kehutanan (kali)	1	0	0	0	0
5	Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi	Terwujudnya data dan informasi kehutanan Provinsi yang berkualitas	Tersedianya dokumen profil kehutanan provinsi (judul)	1	0	1	1	1
			Tersedianya dokumen statistik kehutanan provinsi (judul)	1	0	1	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Terbentuknya pengelolaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dengan melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (Desa)	2	0	6	5	6
			Meningkatnya pemahaman dan kapasitas kelembagaan KPHP Model Minas Tahura (Desa)	2	0	4	4	4
6	Memantapkan sistim jaringan dan komunikasi data kehutanan provinsi	Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem jaringan komunikasi data kehutanan	Tersedianya system jaringan informasi kehutanan (paket)	1	0	1	1	1
			Meningkatnya kualitas data dan informasi pemanfaatan hasil hutan (judul)	1	1	1	1	1
			Keikutsertaan kegiatan pameran tahunan (Riau expo)	0	2	0	0	0
			Tersosilisasinya kegiatan media TV online (paket)	0	1			
			Terselenggaranya system manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan se provinsi Riau melalui media online					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Tersosialisasinya kegiatan nedia TV online					
			Adanya informasi melalui media cetak		1			
Misi 6 : Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan								
1	Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan	Terlaksananya program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdaya guna dan tepat sasaran bagi masyarakat	Terbina dan termonitornya pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan pemegang ijin di bidang kehutanan (unit)	38	38	55	55	55
2	Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	0	-	5	10	10

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

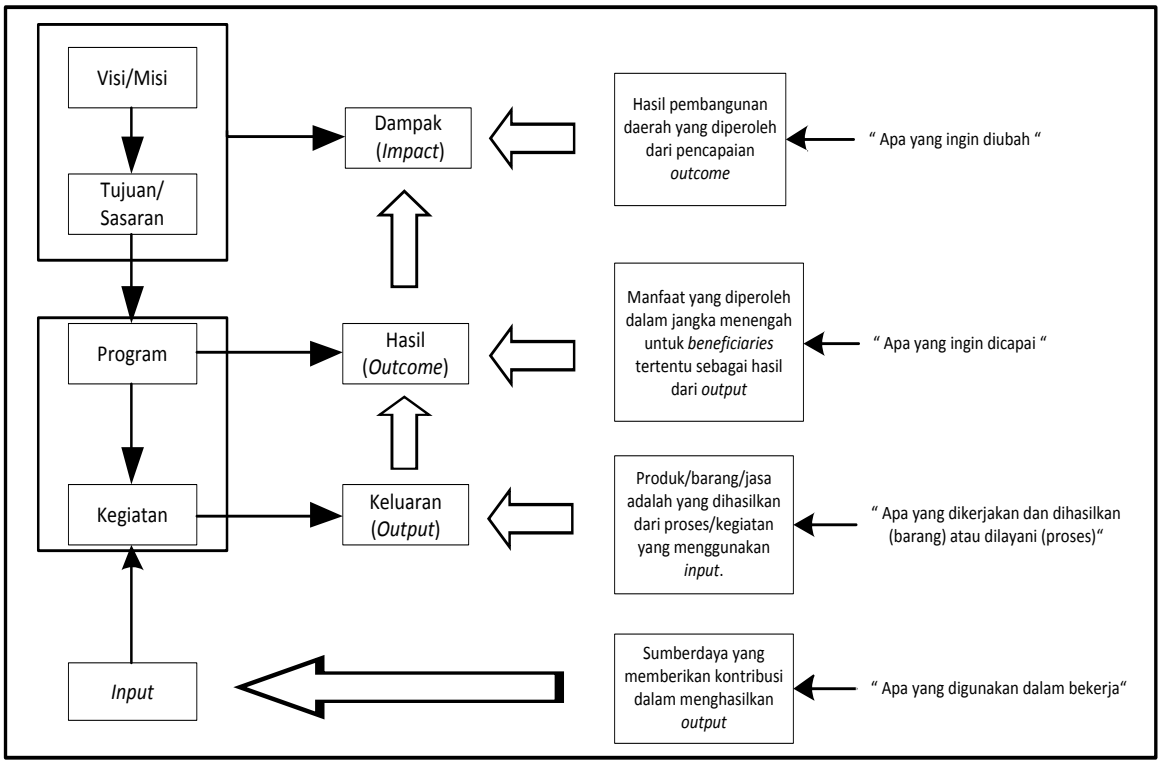

Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Hubungan antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

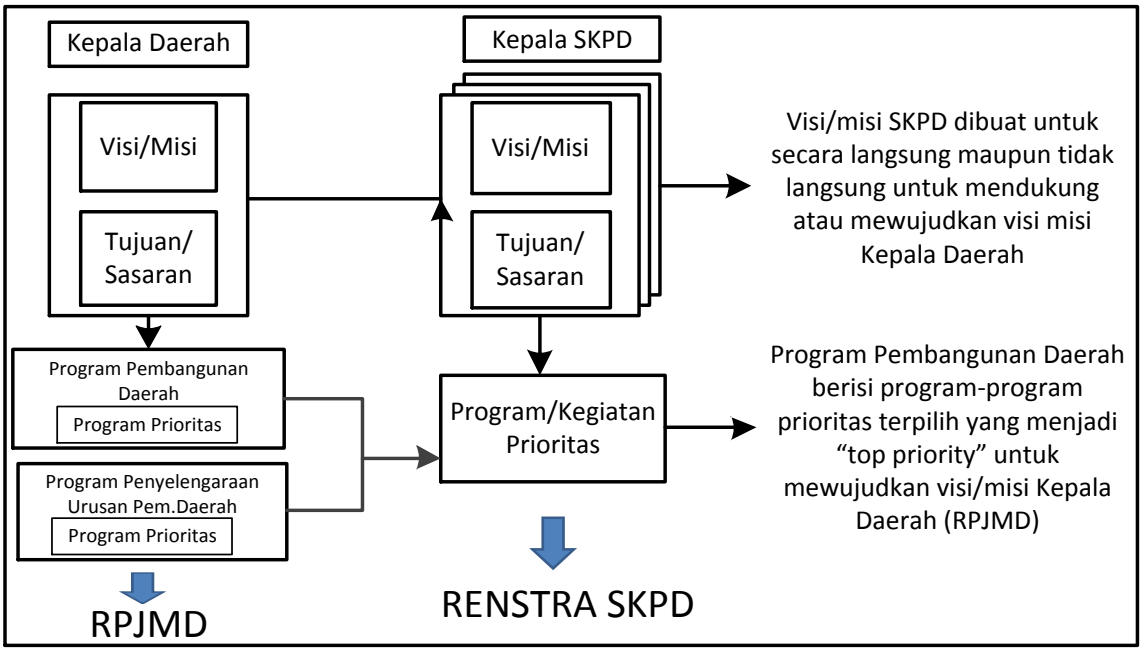

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Provinsi Riau, yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD Provinsi Riau yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

4.1.4.1. Strategi Jangka Menengah SKPD

Strategi menjelaskan tujuan dan sasaran akan dicapai & dijabarkan dalam kebijakan, menunjukkan keinginan yang kuat SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Perencanaan Strategik dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable* untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari

implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.3

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

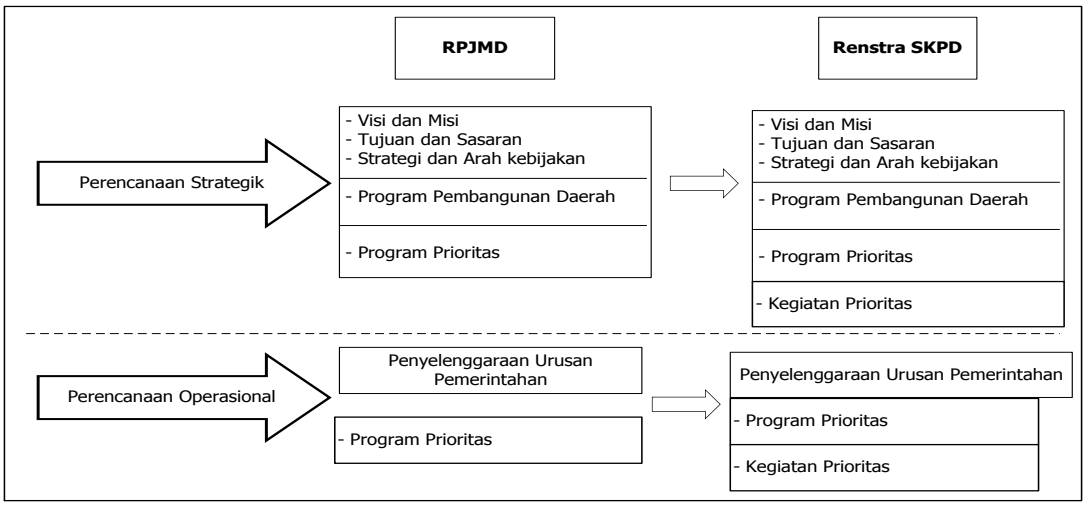

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : perencanaan strategis dan perencanaan opersional. Berdasarkan hal tersebut maka SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam merencanakan program dan kegiatan harus mampu memecahkan : (1) permasalahan pembangunan daerah *(visi, misi tujuan dan sasaran SKPD)* dan (2) permasalahan urusan pemerintahan daerah *(indikator kinerja Daerah)*, seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.4

Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja

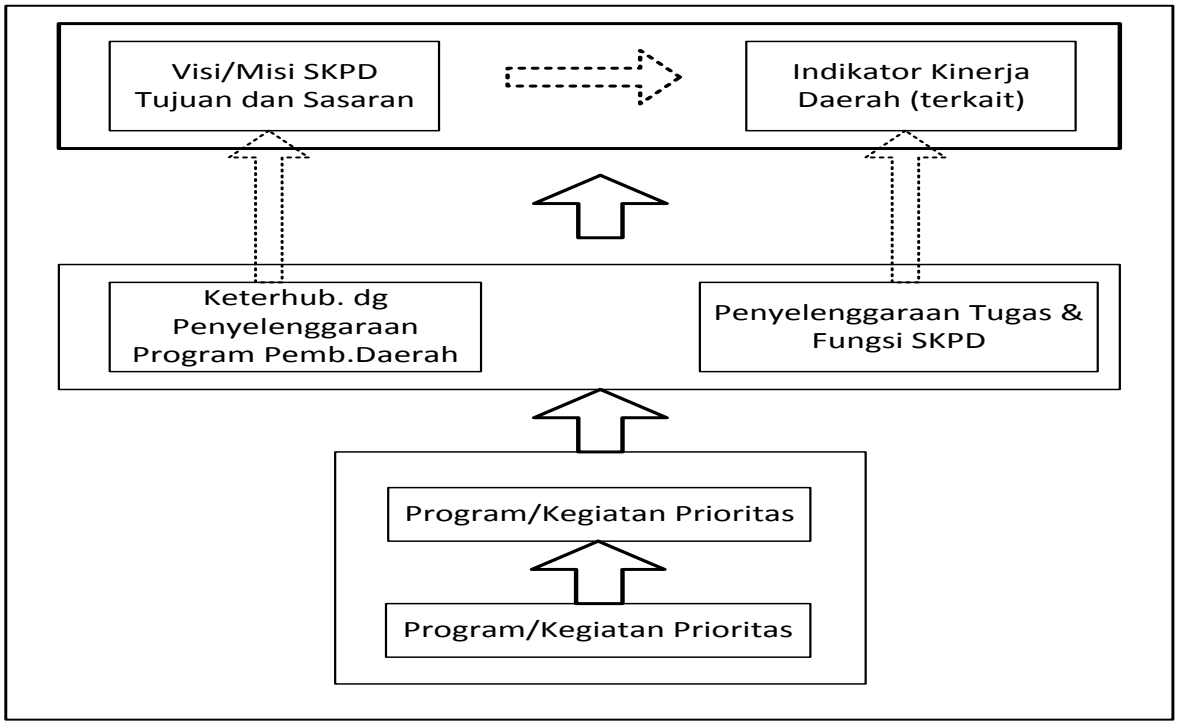

Perumusan strategi pada Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau dilakukan dengan menentukan pilihan langkah yang paling tepat dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal / **Faktor Internal**	**Peluang :** 1. Kebutuhan akan lingkungan yang bersih, sehat dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Adanya kebijakan tentang "*Carbon Trade*" 3. Meningkatkan mutu dan legalitas produk-produk hasil hutan	**Tantangan:** 1. Menciptakan kondisi hutan yang terpelihara dan terkelola dengan baik 2. Penyediaan areal-areal untuk carbon trade 3. Menerapkan sertifikasi legalitas hasil hutan
Kekuatan : 1. Potensi Sumber daya hutan Provinsi Riau yang cukup besar berupa hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan dan pariwisata alam 2. Terdapat 19 lokasi kawasan konservasi/pelestarian alam dan hutan lindung seluas 228793.82 Ha, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang sistem kehidupan 3. Tersedianya alokasi anggaran rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH-SDA DR) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan. 4. Terdapat 68 unit Izin usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman yang mampu memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. 5. Ketersediaan aparatur	Alternatif Strategi : 1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan Kehutanan melalui kegiatan inventarisasi, pengukuhan hutan, pemantapan pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya 2. Pengembangan konservasi dan pelestarian sumber daya alam, guna menunjang sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman plasma nuftah dan menjamin pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. 3. Meningkatkan usaha rehabilitasi sumber daya alam hutan, tanah dan air antara lain melalui reboisasi, penghijauan dan pengawetan tanah yang diarahkan kepada pengembangan wilayah	Alternatif Strategi : 1. Melakukan penataan batas kawasan hutan untuk memberikan batas yang jelas dan kepastian hokum di lapangan 2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumber daya alam 3. Mendorong terciptanya pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan melibatkan berbagai instansi yang terkait 4. Pengembangan diversfikasi dan peningkatan kualitas produk hasil hutan. 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana

kehutanan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta SDM kehutanan yang tersebar baik di pemerintahan maupun di badan usaha kehutanan di Provinsi, merupakan modal utama dan kekuatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan kehutanan 6. Program dan kegiatan pembangunan kehutanan tersebar di berbagai institusi baik di UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sehingga perlu pengendalian dan pengawasan yang intensif. 7. Banyaknya masyarkat desa yang tinggal di sekitar hutan merupakan benteng bagi kelstarian hutan, dengan meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam penggunaan lahan secara bijaksana	terpadu menurut daerah aliran sungai. 4. Meningkatkan produksi kehutanan untuk memperluas lapangan kerja dan menunjang pembangunan industri yang dapat memperbesar penghasilan devisa melalui ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal. 6. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan kehutanan. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.	prasarana penunjang kegiatan. 6. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dengan institusi kehutanan di tingkat pusat maupun kabupaten/kota dan melibatkan SKPD terkait dan serumpun. 7. Memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk mendapat kesempatan berpartisipasi / ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
Kelemahan: 1. Potensi Sumber daya hutan Provinsi Riau yang cukup besar belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal. 2. Kondisi kawasan konservasi/pelestarian alam dan hutan lindung banyak yang mengalami kerusakan akibat	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan 2. Melakukan perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan hutan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perusakan hutan	Alternatif Strategi : 1. Melakukan penataan izin pemanfaatan sumber daya hutan 2. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan lintas sektoral.

perambahan dan penguasaan lahan. 3. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH-SDA DR) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, belum dimanfaatkan secara optimal. 4. Pembinaan dan pengendalian Izin usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman untuk memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. 5. Ketersediaan aparatur kehutanan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta SDM kehutanan yang tersebar baik di pemerintahan maupun di badan usaha kehutanan di Provinsi, perlu dikembangkan sebagai modal utama dan kekuatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan kehutanan 6. Program dan kegiatan pembangunan kehutanan tersebar di berbagai institusi baik di UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan SKPD Kehutanan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sehingga perlu diselaraskan dan diarahkan sehingga tepat sasaran. 7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarkat desa di sekitar hutan masih lemah.	3. Pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai, meliputi berbagai instansi terkait dan disiplin ilmu . 4. Meningkatkan kemitraan kehutanan dengan badan usaha kehutanan dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. 5. Pengembangan aparatur dan lembaga / organisasi untuk mendukung kesuksesan program pembangunan kehutanan 6. Meningkatkan koordinasi, dengan PT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan SKPD Kehutanan Kabupaten / kota se Provinsi Riau 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.	4. Mendorong badan usaha kehutanan untuk memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. 5. Peningkatan kualitas aparatur, melalui pendidikan dan pelatihan pegawai dan dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 6. Membentuk forum komunikasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dengan institusi kehutanan di tingkat pusat maupun kabupaten / kota dan SKPD terkait dan serumpun. 7. Melakukan perbaikan birokrasi pelayanan kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan berpartisipasi / ikut serta dalam kegiatan kehutanan.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, maka strategi pembangunan kehutanan selama lima tahun (2014-2019) adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan Kehutanan berupa peningkatan kegiatan inventarisasi dan evaluasi untuk mengenal kondisi hutan dan pengukuhan hutan untuk memberikan jaminan teknis dan yuridis dalam rangka pemantapan kegiatan pengelolaan serta penetapan peruntukan hutan yang sesuai dengan fungsinya.
2. Pengembangan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Hal ini sangat penting guna menunjang sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman plasma nuftah dan menjamin pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem dalam rangka meningkatkan mutu hidup bangsa Indonesia.
3. Meningkatkan usaha rehabilitasi sumber daya alam hutan, tanah dan air antara lain melalui reboisasi, penghijauan dan pengawetan tanah yang diarahkan kepada pengembangan wilayah terpadu menurut daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan produksi kehutanan untuk memperluas lapangan kerja dan menunjang pembangunan industri yang dapat memperbesar penghasilan devisa melalui ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal.
6. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan kehutanan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.

1. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kehutanan adalah melakukan Pendekatan *Pro Environment,* sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan terutama dalam masalah Pemanasan Global (*Global Warming*), untuk itu dengan melaksanakan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui Skenario Hijau, penguatan fungsi dan pengembangan pemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan, menjaga dan mengawasi luas kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah dan meningkatkan mutu kawasan hutan.

Sejalan dengan arah kebijakan umum, visi, misi dan strategi pembangunan kehutanan Provinsi Riau, serta memperhatikan perkembangan kondisi saat ini, maka Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip "*Good Governance*" menempuh kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Riau.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau

VISI : Terwujudnya sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat			
MISI I : Menguatkan Kelembagaan dan Kewirasahaan Masyarakat Sekitar Hutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1 Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan	1 Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan	1 Mendampingi terbentuknya lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan	1 Memfasilitasi lembaga masyarakat untuk berrusaha di bidang kehutanan
2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	1 Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat kehutanan	1 Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan
MISI II : Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
1 Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP Model Minas Tahura	1 Terwujudnya penutupan lahan kritis	1 Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	1 Melaksanakan pemulihan kawasan hutan dan lahan sesuai fungsinya
2 Menurunkan luasan lahan kritis	2 Data dan informasi lahan kritis skala provinsi Riau tersedia sebanyak 1 paket	1 Monitoring dan evaluasi perkembangan dan sebaran lahan kritis dengan metode pengindraan jauh dan survey lapangan	1 Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai
3 Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS	3 Peningkatan pembuatan tanaman pada lahan kritis seluas 250.000 Ha	1 Pembinaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan secara intensif	1 Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan	4 Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm, HTR, HR, dll) seluas 100.000 Ha	1 Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat kepada seluruh stakeholder secara intensif serta pembentukan kelompok kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat skala provinsi	1 Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai
5 Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat	5 Menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat sebanyak 2.500.000 batang	1 Monitoring dan evaluasi perkembangan dan sebaran lahan kritis dengan metode pengindraan jauh dan survey lapangan	1 Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai
6 Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan	6 Terbangunnya sumber benih tanaman kehutanan sebanyak 10 unit	1 Inventarisasi dan pembinaan sumber benih pada kawasan hutan, baik yang telah dibebani hak maupun yang tidak dibebani hak	1 Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai

MISI III : Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1 Mempertahankan fungsi hutan	1 Terwujudnya penegakan hukum dalam dalam kasus bidang kehutanan	1 Pendampingan penyelesaian proses hukum penyalahgunaan kawasan hutan	1 Penyediaan data dan peta dalam rangka pendampingan penyelesaian proses hukum penyalahgunaan kawasan hutan
	2 Terjaganya kawasan hutan dari okupasi dan illegal logging	1 Melaksanakan sosialisasi keberadaan KPHP dan melaksanakan patroli perlindungan dan pengamanan KPHP	1 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
2 Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non procedural	3 Terwujudnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non procedural	1 Melaksanakan pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural	1 Melaksanakan pencegahan perusahaan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural
	4 Mewujudkan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan	1 Melaksanakan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan	1 Melaksanakan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	5 Terwujudnya pengawasan peredaran bibit	1 melaksanakan pengawasan peredaran bibit	1 Melaksanakan pengawasan peredaran bibit
	6 Terwujudnya pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan	1 Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara berkesinambungan	1 Melaksanakan pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan
	7 Terwujudnya pengawasan terhadap pencadangan areal HTR	1 Melaksanakan pengawasan terhadap pencadangan areal HTR	1 Melaksanakan pengawasan terhadap pencadangan areal HTR
	8 Terwujudnya pemahaman hukum masyarakat dalam pemanfaaatn hutan	1 Melakukan upaya preventif melalui penyuluhan pemahaman hukum dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan kepada masyarakat	1 Melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan pemahaman hukum dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan kepada masyarakat
			2 Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana perlindungan hutan
3 Menertibkan penatausahaan bahan baku industri kehutanan	9 Tercapainya tertib pemenuhan bahan baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Melaksanakan penyelesaian kasus, saksi ahli, pengukuran dan pengujian bahan baku industry	1 Penyelesaian kasus terkait penerimaan bahan baku industri

MISI IV : Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	**Tujuan**	**Tujuan**	**Tujuan**
1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor kawasan hutan KPHP Minas Tahura	1 Mendampingi masyarakat sekitar hutan KPHP Minas Tahura dalam membentuk kelompok kerja yang berwawasan lingkungan	1 Terbentuknya mitra kerja antara KPHP Minas Tahura dan Masysrakat sekitar hutan KPHP Minas Tahura
2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau	2 Perhitngan stok karbon dari deforestasi dan degradasi hutan produksi Provinsi Riau	1 Pembuatan plot demonstrasi aktivitas	1 Tersedianya plot demonstrasi aktivitas pada berbagai tipe kawasan hutan
3 Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	3 Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif dan berwawasan lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat	1 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan azas kelestarian	1 Mendorong unit usaha melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan tata ruang hutan dan menjaga kerusakan lingkungan
		2 Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	1 Melaksanakan fasilitasi dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3 Penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dan stakeholder dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	1 Melaksanakan fasilitasi dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder serta sinergitas kebijakan pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu
		4 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan	1 Mendorong unit manajemen melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewajibannya
4 Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	4 Meningkatnya keragaman produk kehutanan bukan kayu atau HHBK	1 Menyelenggarakan pendidikan dan pelathan bagi masyarakat yang mempunyai potensi penghasil bahan baku HHBK	1 Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kehutanan bukan kayu atau HHBK melalui pendidikan dan pelatihan
	5 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi produk kehutanan bukan kayu atau HHBK	1 Menyebarluaskan data dan informasi potensi produk kehutanan bukan kayu atau HHBK kepada masyarakat umum	1 Mengikuti kegiatan pameran, promosi dan kegiatan sejenis baik yang dilaksanakan di dalam / di luar Provinsi
	6 Meningkatkan kualitas pendampingan dari tenaga penyuluh kehutanan	1 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh kehutanan	1 Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur penyuluh kehutanan sehingga dapat menjadi pendamping masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5 Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman	7 Pengelolaan kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi pada 60 izin	1 Meningkatkan pengawasan pengelolaan kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi pada konsesi hutan tanaman	1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	8 Batas kawasan hutan kelihatan jelas di lapangan		
6 Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan	9 Terlaksananya penyeimbangan secara bertahap suplai demand kayu	1 melaksanakan pembinaan dan penertiban industri kehutanan dan bahan baku industri	1 Pembinaan dan penertiban industri kehutanan dan bahan baku industri
	10 Terlaksananya tertib penatausahaan blako dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan	1 Melaksanakan pembinaan dan penertiban penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan	1 pembinaan dan penertiban penatausahaan blanko angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
	11 Terwujudnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara ooptimal	1 Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan penatausahaan iuran kehutanan	1 Mendorong peran serta pejabat penagih / wajib bayar dalam penerimaan negara
7 Mengoptimalkan kemitraan kehutanan	12 Terwujudnya pengembangan kemitraan kehutanan		

MISI V : Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1 Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan	1 Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & produksi	1 Penegasan terhadap batas kawasan hutan lindung dan produksi di lapangan dengan penanaman pohon batas	1 Data dan laporan penyelenggaran penataan batas serta kondisi eksistng batas di lapangan
	2 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT	2 Pengawasan Pelaksanaan Batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT	1 Data dan laporan monitoring dan evaluasi penataan batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT
	3 Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan	3 Survey lapangan dan sosialisasi tertibnya penggunaan kawasan hutan	1 Data dan laporan tertibnya penggunaan kawasan hutan
	4 Tetibnya penyelenggaraan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan	4 Survey lapangan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan	1 Data dan laporan penyelenggaraan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan
	5 Tertibnya Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan	5 Survey lapangan dan sosialisasi tertibnya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan	1 Data dan laporan tertibnya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan
	6 Terinventarisasinya kawasan hutan	6 Survey lapangan berupa inventarsisasi terhadap potensi hutan khususnya tegakan dalam kawasan hutan	1 Data dan laporan potensi sumber daya hutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2 Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi	1 Tersusunnya rencana makro penyelenggaraan kehutanan provinsi, statistik, dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan	1 Penyelarasan rencana pembangunan yang berbasis lahan dengan kebutuhan luas kawasan hutan	1 Sinkronisasi rencana makro kehutanan provinsi dan nasional
		2 Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data kehutanan provinsi	1 Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan jaringan komunikasi data kehutanan provinsi
3 Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP Minas Tahura	2 Menyamakan persepsi terhadap status kawasan KPHP Minas Tahura antar Para Pihak	1 Memfasilitasi pengukuhan kawasan hutan	1 Menggesa kepastian hukum wilayah kerja KPHP Model Minas Tahura
4 Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan	3 Terwujudnya peningkatan kinerja dengan dukungan peralatan yang memadai	1 Penyediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung	1 Peningkatan kinerja dengan dukungan peralatan yang memadai dan terpelihara
5 Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi	5 Terwujudnya data dan informasi kehutanan Provinsi yang berkualitas	1 Penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyediaan data dan informasi kehutanan yang berkualitas	1 Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi kehutanan Provinsi
6 Memantapkan sistim jaringan dan komunikasi data kehutanan provinsi	6 Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem jaringan komunikasi data kehutanan	1 Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data kehutanan	1 Sistim jaringan komunikasi deata kehutanan

MISI VI : Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1 Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan	1 Terlaksananya program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdaya guna dan tepat sasaran bagi masyarakat	1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemegang ijin usaha di bidang kehutanan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta kemitraan dengan pemerintah daerah	1 Melaksanakan pembinaan dan evaluasi TJSP serta Sinergitas program tanggung jawab sosial perusahaan para pemegang ijin usaha di bidang kehutanan
2 Meningkatnya peran serta badan usaha pada sektor kehutanan dalam pembangunan hutan yang lestari	2 Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan mayarakat sekitar hutan	1 Mengoptimalkan peran serta badan usaha di sektor kehutanan	1 Meningkatkan kerjasama dengan badan usaha di sektor kehutanan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
BELANJA DAERAH								62.513,81		54.150,45		75.639,07		81.377,21		86.896,75		359.677,29		
BELANJA TIDAK LANGSUNG								32.252,94		33.507,76		33.511,65		33.515,54		33.519,43		166.307,33		
BELANJA LANGSUNG								30.260,86		20.642,68		42.127,42		47.861,67		53.377,32		193.369,95		
NON URUSAN								7.511,86		6.242,68		11.591,22		13.909,47		16.691,36		55.946,59		
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persenatase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	-	48	4.921,86	48	4.262,68	48	5.115,22	48	6.138,27	48	7.365,92	48	27.803,95		
			01 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa lanyanan surat menyurat (%0	-	100	21,86	100	25,00	100	30,00	100	36,00	100	43,20	100	156,06	Sekretariat	Pekanbaru
			01 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	-	100	705,00	100	800,00	100	960,00	100	1.152,00	100	1.382,40	100	4.999,40	Sekretariat	Pekanbaru
			01 3	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (%)	-	90	280,00	90	250,00	90	300,00	90	360,00	90	432,00	90	1.622,00	Sekretariat	Pekanbaru
			01 4	Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kantor (%)	-	100	360,00	100	360,00	100	432,00	100	518,40	100	622,08	100	2.292,48	Sekretariat	Pekanbaru
			01 5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (%)	-	100	150,00	100	100,00	100	120,00	100	144,00	100	172,80	100	686,80	Sekretariat	Pekanbaru
			01 6	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (%)	-	100	100,00	100	102,68	100	123,22	100	147,87	100	177,44	100	651,21	Sekretariat	Pekanbaru
			01 7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan banhunan selama 12 bulan	-		95,00		100,00		120,00		144,00		172,80		631,80	Sekretariat	Pekanbaru
			01 8	Penyediaan makanan & minuman	Terselenggaranya Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	-		100,00		100,00		120,00		144,00		172,80		636,80	Sekretariat	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggungjawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01 9	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	-		460,00		200,00		240,00		288,00		345,60		1.533,60	Sekretariat	Pekanbaru
			01 10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terjaganya Lingkungan Kantor	-		195,00		200,00		240,00		288,00		345,60		1.268,60	Sekretariat	Pekanbaru
			01 11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terbaru	-		130,00		100,00		120,00		144,00		172,80		666,80	Sekretariat	Pekanbaru
			01 12	Optimalisasi Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan UPT TAHURA SSH	-		1.500,00		950,00		1.140,00		1.368,00		1.641,60		6.599,60	UPT KPHP Minas Tahura	Pekanbaru
			01 13	Optimalisasi Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Benih Rehabilitasi & Konservasi Hutan	Meningkatnya dukungan manegeman administrasi dan teknis UPT BRKH	-		275,00		275,00		330,00		396,00		475,20		1.751,20	UPT BRKH	Pekanbaru
			01 14	Optimalisasi Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan & Pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya tugas teknis dan administrasi perkantoran UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		200,00		300,00		360,00		432,00		518,40		1.810,40	UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pekanbaru
			01 15	Pengadaan Sarana & Prasarana UPT Pelatihan Kehutanan & Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	-		100,00		-		-		-		-		100,00	UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pekanbaru
			01 16	Optimalisasi Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	-		250,00		250,00		300,00		360,00		432,00		1.592,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01 17	Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	Terfasilitasinya Diklat Teknis dan Administrasi serta Pengelolaan Kepegawaian	-				150,00		180,00		216,00		259,20		805,20	Sekretariat	
			02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)**	**60**	**15**	**1.490,00**	**20**	**1.000,00**	**20**	**4.520,00**	**20**	**5.424,00**	**20**	**6.508,80**	**95**	**18.942,80**		
			02 1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Pelayanan dan Pengamanan Gedung Kantor	60		100,00		-		120,00		144,00		172,80		536,80	Sekretariat	Pekanbaru
			02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Ruangan Arsip dan Aset yang Memadai			250,00		200,00		240,00		288,00		345,60		1.323,60	Sekretariat	Pekanbaru
			02 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil jabatan dan Kendaraan Dinas			400,00		250,00		300,00		360,00		432,00		1.742,00	Sekretariat	Pekanbaru
			02 4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan			100,00		100,00		120,00		144,00		172,80		636,80	Sekretariat	Pekanbaru
			02 5	Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana penunjang kantor	Tersedianya akses jalan lingkungan Kantor yang Nyaman			540,00		250,00		300,00		360,00		432,00		1.882,00	Sekretariat	Pekanbaru
			02 6	Penataan Ruang Gedung Kantor Dinas Kehutanan Prov. Riau	Tersedianya ruangan kantor yang tertata dan nyaman			-		200,00		240,00		288,00		345,60		1.073,60	Sekretariat	Pekanbaru
			02 7	Penataan, Pengelolaan dan Sensus Asset Dinas Kehutanan Provinsi Riau 5 tahunan	Tersedianya data aset Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 5 tahun terakhir			-		-		200,00		240,00		288,00		728,00	Sekretariat	Pekanbaru
			02 8	Pembangunan Kantor UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan	Tersedianya Kantor UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan	0		-		-		1.500,00		1.800,00		2.160,00		5.460,00	UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			02 9	Pembangunan Kantor UPT Pelatihan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Tersedianya Kantor UPT Pelatihan dan Pemeberdayaan Masyarakat	0		-		-		1.500,00		1.800,00		2.160,00		5.460,00	UPT Pelatihan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Pekanbaru
			02 10	Pengadaan peralatan Kantor	Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya	80		100,00		-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	100,00	Sekretariat	Pekanbaru
			03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi (%)**	**5**	**0**	**-**	**15**	**480,00**	**15**	**576,00**	**15**	**691,20**	**20**	**829,44**	**65**	**2.576,64**		
			03 1	Pembinaan Fisik dan Mental aparatur	Meningkatnya Displin dan tertibnya Administrasi Aparatur					150,00		180,00		216,00		259,20		805,20	Sekretariat	Pekanbaru
			03 2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu dan PDH, PDL, Sepatu dan Atribut Polhut			-	276 org	330,00		396,00		475,20		570,24		1.771,44	Sekretariat	Pekanbaru
			04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase sumber daya aparatur yang meningkat (%)**	**-**	**7**	**300,00**	**-**	**-**	**7**	**180,00**	**7**	**216,00**	**7**	**259,20**	**28**	**955,20**		
			04 1	Pendidikan & pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai			100,00		-		180,00		216,00		259,20		755,20	Sekretariat	Pekanbaru
			04 2	Pembinaan fisik & mental aparatur	Meningkatnya Produktifitas Kerja Pegawai			150,00		-								150,00	Sekretariat	Pekanbaru
			04 3	Penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja & Peta Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan			50,00		-		-		-		-		50,00	Sekretariat	Pekanbaru
			05	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat (%)**	**10**	**10**	**800,00**	**10**	**100,00**	**10**	**1.200,00**	**10**	**1.440,00**	**10**	**1.728,00**	**50**	**5.268,00**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			05 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Judul)	2	2	100,00		-								100,00	Sekretariat	Pekanbaru
			05 2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan yang akuntable			200,00		-		-		-		-		200,00	Sekretariat	Pekanbaru
			05 3	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2014 sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010			250,00		-		-		-		-		250,00	Sekretariat	Pekanbaru
			05 4	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset Tahunan				2	100,00								100,00	Sekretariat	Pekanbaru
			05 5	Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Renja SKPD Tahun 2014 sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010			250,00		-		-		-		-		250,00	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 01 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kehutanan	Tersusunnya Rencana strategis, Renja SKPD, RKA-SKPD/KL dan DPA-SKPD dan informasi perencanaan Dinas Kehutanan (Dokumen)	5	0	-	-	-	5	360,00	5	432,00	5	518,40	5	1.310,40	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 01 7	Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan (kali)	7	0	-	-	-	7 Kali	600,00	7 Kali	720,00	7 Kali	864,00	28 Dokumen	2.184,00	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 01 8	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kehutanan	Tersusunnya Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Rentra, Data dan informasi perencanaan Kehutanan (Dokumen)	6	0	-	-	-	6 Dokumen	240,00	6 Dokumen	288,00	6 Dokumen	345,60	24 Dokumen	873,60	Sekretariat	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06	**Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah**	**Prosentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah (%)**	**-**	**-**	**-**	**5**	**400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**400,00**		
			06 1	Penataan, Pengelolaan dan sensus Aset Dinas Kehutanan Provinsi Riau 5 tahunan	Tersedianya data aset Dinas Kehutanan Provinsi Riau 5 tahun terakhir (Laporan)	-	-	-	1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	100,00	Sekretariat	Pekanbaru
			06 2	Penilaian Aset Gedung Markas Polisi Kehutanan Provinsi Riau	Diketahuinya nilai aset gedung markas polisi kehutanan Provinsi Riau (Dokumen)	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	150,00	Sekretariat	Pekanbaru
			06 3	Penyusunan DED Kantor UPT Kehutanan Provinsi Riau	Tersusunnya DED kantor UPT Kehutanan Provinsi Riau (Dokumen)	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	150,00	Sekretariat	Pekanbaru
URUSAN WAJIB																		-		
URUSAN PILIHAN						**-**	**-**	**22.749,00**	**-**	**14.400,00**	**-**	**30.536,20**	**-**	**33.952,20**	**-**	**36.685,96**	**-**	**137.423,36**	**-**	**-**
KEHUTANAN								**22.749,00**		**14.400,00**		**30.536,20**		**33.952,20**		**36.685,96**		**137.423,36**		
Misi 1 : Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan																		-		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan	**1. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan**	**Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan**	**2 03 1**	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan**	**Terbentuknya lembaga masyarakat dalam kewirausahaan di sektor kehutanan**	**10**	**-**	**200,00**	**6**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**	**4**	**-**	**20**	**200,00**		
			2 03 1 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Fasilitasi Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan Fasilitasi kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan serta meningkatnya kemandirian lembaga usaha masyarakat berbasis kehutanan SDH (lembaga)	10		200,00	-	-	5	-	5	-	4	-	14	200,00	UPT PKPM	se Prov. Riau
	2.Meningkatnya ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	**Berkembangnya usaha masyarakat sekitar hutan**	**2 03 02**	**Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**		**-**		**575,00**		**-**		**470,00**		**494,00**		**522,80**		**2.061,80**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 02 1	Pelatihan Pengembangan potensi ekonomi masyarakat di sekitar hutan	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kehutanan bukan kayu atau HHBK (Pelatihan)	240		375,00	-	-	4	-	5	-	6	-	15	375,00	UPT PKPM	se Prov. Riau
			2 03 02 2	Kegiatan pembangunan model pengembangan usaha budidaya Gaharu	Terbangunnya model usaha budidaya gaharu (Unit)	-		-	-	-	1	100,00	1	100,00	1	100,00	3	300,00	UPT BRKH	4 kab./kota
			2 03 02 3	Peningkatan ekonomi masyarakt melalui Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat	Tercapainya pemahaman berbagai pihak baik pusat maupun daerah, antar instansi terkait, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan di Provinsi Riau (Kab/Kota)	7	7	100,00	-	-	7	250,00	7	250,00	7	250,00	7	850,00	UPT BRKH	Inhil, Pelalawan, Dumai, Meranti, Bengkalis, Rohil, Siak
			2 03 02 4	Pengembangan, Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPHP Model Minas Tahura	Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta & terlaksanaya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat/swasta di sekitar wilayah KPHP Model Minas Tahura (kali)	-	-	-	-	-	4	-	5	-	6	-	15	-	UPT KPHP Model Minas Tahura	KPHP Model Minas Tahura
			2 03 02 5	Pengembangan, Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta & terlaksanaya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat/swasta di sekitar wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali)	-	-	-	-	-	4	-	5	-	6	-	15	-	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 02 6	Pemantauan evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan (desa)	12	12	100,00	-	-	12	120,00	12	144,00	12	172,80	48	536,80	UPT PKPM	se Prov. Riau
Misi 2 : Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		-		
1. Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP	**Terwujudnya penutupan lahan kritis**	**Tersedianya dan terpeliharanya Sarana prasarana KPHP**	**2 03 03**	**Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui rehabilitasi hutan dan lahan Kritis**	**6.745.000.000**		**6.645,00**		**3.290,00**		**4.815,20**		**4.845,20**		**4.880,96**		**24.476,36**		
			2 03 **03** 1	Pengadaan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim	Peningkatan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana lokasi wisata alam TAHURA SSH (Paket)	100	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00	UPT KPHP Minas Tahura	KPHP Minas Tahura
2. Menurunkan luasan lahan kritis	**Data dan informasi rehabilitasi lahan kritis skala provinsi Riau tersedia sebanyak 1 paket**	**Tersedianya data dan informasi perencanaan, perbenihan, rehabilitasi dan peta sebaran lahan kritis**	2 03 **03** 2	Update data dan peta / Inventarisasi hutan dan lahan kritis	Terjaminnya kualitas data dan Peta sebaran lahan kritis di Provinsi Riau (Kab/Kota)	12	12	150,00	1	100,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	700,00	UPT BRKH	12
			2 03 **03** 3	Pengadaan Bibit Gaharu	Terciptanya peluang usaha pembibitan tanaman hutan dan MPTS	-		650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	UPT BRKH	Pelalawan & Rohil
			2 03 **03** 4	Identifikasi dan Pengayaan areal kurang produktif di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Teridentifikasinya areal tidak produktif serta terlaksananya pengayaan tanaman pada hutan produksi di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Ha)	-	-	-	-	-	40	800,00	40	800,00	40	800,00	120	2.400,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **03** 5	Kegiatan eksplorasi benih	Terkumpulkannya benih unggulan dari berbagai daerah (Jenis)	-	-	-	-	-	10	100,00	10	100,00	10	100,00	30	300,00	UPT BRKH	Di dalam dan luar Prov. Riau
			2 03 **03** 6	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi karakteristik DAS	Terdatanya karakteristik DAS di Prov. Riau (unit)	-	-	-	-	-	1	300,00	1	300,00	1	300,00	3	900,00	UPT BRKH	4 unit DAS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **03** 7	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Hutan Kota	Mendorong kabupaten/kota dalam pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan kota (Lokasi)	-	-	-	12	120,00	12	144,00	12	172,80	12	207,36	48	644,16	UPT BRKH	12 kab./kota
			2 03 **03** 8	Kegiatan pembinaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Terbangunnya unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat (unit)	-	-	-	-	-	2	150,00	2	150,00	2	150,00	6	450,00	UPT BRKH	6 kab./kota
			2 03 **03** 9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kehutanan	Tersusunnya Rencana strategis, Renja SKPD, RKA-SKPD/KL dan DPA-SKPD dan informasi perencanaan Dinas Kehutanan (Dokumen)	5	0	-	5	300,00	-	-	-	-	-	-	5	300,00	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 **03** 10	Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan (kali)	0	0	-	7	250,00	-	-	-	-	-	-	7	250,00	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 **03** 11	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kehutanan	Tersusunnya Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Rentra, Data dan informasi perencanaan Kehutanan (Dokumen)	0	0	-	6	200,00	-	-	-	-	-	-	6	200,00	Sekretariat	Pekanbaru
3. Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS	**Peningkatan pembuatan tanaman pada lahan kritis seluas 250.000 ha**	**Tercapainya pembuatan tanaman rehabilitasi**	2 03 **03** 12	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten/kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di Kab/ Kota sesuai kaidah teknis yang ada (Kab/Kota)	12	12	175,00	12	200,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	60	1.125,00	UPT BRKH	12 kab / kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan	**Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm, HTR, HR, dll)**	**Terbangunnya unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat**	2 03 **03** 13	Kegiatan pembibitan tanaman hutan untuk kemasyarakatan	Tersedianya bibit tanaman hutan untuk masyarakat (Lokasi)	1	1	200,00	-	-	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	950,00	UPT BRKH	Tahura Sultan Syarif Hasyim
			2 03 **03** 14	Kegiatan pembinaan dan pemantauan sumber benih	Terdatanya sumber benih di Provinsi Riau dengan baik (Kab./Kota)	8	12	200,00	-	-	12	300,00	12	300,00	12	300,00	12	1.100,00	UPT BRKH	se Prov. Riau
5. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat	**Menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat**	**1. Tersedianya bibit untuk masyarakat sebanyak 2.500.000 batang**	2 03 **03** 15	Pembangunan demplot pola rehabilitasi hutan dan lahan	Terbangunnya demplot model agroforesty yang sesuai dengan karakter lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat provinsi Riau (Ha)	2	2	100,00	4	150,00	4	250,00	4	250,00	4	250,00	18	1.000,00	UPT BRKH	5 kab / kota
		2. Tertanaminya areal terbuka eks perambahan hutan dalam areal KPHP Minas tahura	2 03 **03** 16	Pendampingan DAK Bidang Kehutanan Taman Hutan Raya SSH	Rehabilitasi di Kawasan TAHURA SSH serta peningkatan sarpras KPH dan pengamanan Kawasan (Ha)	56	56	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56	270,00	UPT KPHP Minas Tahura	KPHP Minas Tahura
		3. Tertanaminya areal terbuka eks perambahan hutan dalam areal KPHP Minas tahura	2 03 **03** 17	Rehabilitasi areal eks perambahan Kawasan & Peningkatan Sarana Prasarana KPHP Minas Tahura (Alokasi Dana DAK Bidang Kehutanan + dana pendamping)	Penanaman areal terbuka eks perambahan di kawasan KPHP Mins Tahura dan tersedianya sarpras KPHP Minas Tahura (Ha)	56	56	1.500,00	60	1.770,00	60	1.771,20	60	1.772,40	60	1.773,60	296	8.587,20	UPT KPHP Minas Tahura	KPHP Minas Tahura

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6. Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan	**Terbangunnya sumber benih tanaman kehutanan sebanyak 10 unit**	**Terbangunnya sumber benih sejumlah 10 unit**	2 03 **03** 18	Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Perbenihan / Pembibitan Tanaman hutan di Provinsi Riau	Terpeliharanya Pusat Pembibitan UPT BRKH di Lubuk Sakat Kec. Siak HuluKab. Kampar (Lokasi)	1	1	200,00	1	200,00		350,00		350,00		350,00	2	1.450,00	UPT BRKH	Pusat Pembibitan UPT BRKH di Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
			2 03 **03** 19	Pengembangan Pusat Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hutan Provinsi Riau	Tersedianya sarana dan prasarana, serta terpenuhinya bibit yang bermutu baik (Paket)	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	UPT BRKH	Pusat Pembibitan UPT BRKH di Lubuk Sakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Misi 3 : Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan																		-		
1. Mempertahankan fungsi hutan	**1.Terwujudnya penegakan hukum dalam dalam kasus bidang kehutanan**	**Tertanganinya kasus tindak pidana kehutanan**	**2 03 04**	**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan**	**Tertanganinya tindak pidana perusakan hutan**			**7.299,00**		**4.515,00**		**10.983,00**		**12.246,00**		**13.016,60**		**48.059,60**		
			2 03 **04** 1	Pendampingan dalam proses hukum penyalahgunaan kawasan hutan di Provinsi Riau	Terdampinginya penyelesaian kasus pelanggaran hukum penyalahgunaan kawasan hutan di Provinsi Riau	30	30	180,00	30	140,00	30	225,00	30	250,00	30	275,00	150	1.070,00	Planoligi Kehutanan	Provinsi Riau
	2.Terjaganya kawasan hutan dari perambahan, okupasi lahan dan illegal logging	**Terjaganya lokasi rawan perambahan**	2 03 **04** 2	Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura	Pengamanan secara preventif dan persuasif di seluruh Kawasan KPHP Model Minas Tahura (Lokasi)	-	1	464,00	1	-	1	480,00	1	576,00	1	691,20	5	2.211,20	KPHP Minas Tahura	KPHP Minas Tahura
2. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural	**1.Terwujudnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural**	**Melaksanakan pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan**	2 03 **04** 3	Pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan non prosedural (operasi)	Meningkatnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan non prosedural (operasi)	-	-	-	-	-	15	200,00	15	200,00	15	200,00	45	600,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 4	Pemberantasan Pembalakan Liar & Perambahan Kawasan Hutan	Meningkatnya pencegahan perusakan hutan yang disebabkan oleh illegal logging (operasi)	-	10	1.500,00	-	-	15	200,00	15	200,00	15	200,00	55	2.100,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **04** 5	Operasi Pengamanan Hutan Lintas Daerah	Tertanganinya Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Kasus)	32	8	1.045,00	-	-							8	1.045,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 6	Operasi Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan	Terciptanya Keamanan Kawasan Hutan dari Pembalakan Liar, Perambahan, Penertiban industri illegal, Penguasaan lahan dan pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan (operasi)		-	-	10	1.000,00	-	-	-	-	-	-	10	1.000,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 7	Penanggulangan, Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan	Terlaksananya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Kab./Kota)	12	12	750,00	12	750,00	12	900,00	12	1.080,00	12	1.296,00	12	4.776,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 8	Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah rawan kebakaran hutan dalam penanggulangan kebakaran hutan (Lokasi)	12	12	-	7	500,00	7	600,00	7	720,00	7	864,00	40	2.684,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 9	Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan & Lahan	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja MPA sbg regu pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan kompetensi aparatur dalam penanggulangan bencana hutan dan lahan berbasis masyarakat (Orang)	120	30	200,00	60	200,00	60	240,00	60	288,00	60	345,60	270	1.273,60	UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **04** 10	Pembinaan & pemberdayaan masyarakat pelestari hutan	Peningkatan jumlah kader serta pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh kehutanan swadaya mandiri (PKSM) di Provinsi Riau (Orang)	30	80	250,00	80	250,00	80	300,00	80	360,00	80	432,00	400	1.592,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 11	Penanganan dan Penyelesaian perkara/kasus Tindak Pidana Kehutanan	Terjaminnya penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Kehutanan (Kasus)	-	-	-	5	100,00	5	120,00	5	144,00	5	172,80	20	536,80	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 12	Peningkatan penyuluhan kehutanan & pemberdayaan masyarakat pelestari hutan	Meningkatkan SDM Penyuluh Kehutanan Se-Provinsi Riau dan meningkatkan kompetensi SDM UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat (Orang)	30	30	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30	200,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 13	Pengelolaan Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya data kondisi Hutan Lindung serta tercapainya kesadaran dan timbulnya partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan hutan	4	4	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	360,00	Perlindungan Hutan	Rokan Hulu, Kampar, Kuansing
			2 03 **04** 14	Pemantauan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan IUPHHK di Provinsi Riau	Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Perlindungan Hutan di Areal IUPHHK (Izin)	30	36	300,00	45	225,00	54	270,00	65	324,00	78	388,80	78	1.507,80	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 15	Aksi Serentak Menanam Pohon & Penghijauan & Konservasi Alam Provinsi Riau	Terlaksananya Penanaman Pohon (Kab/Kota)	12	12	450,00	12	-	12	450,00	12	450,00	12	450,00	12	1.800,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 16	Aksi perempuan Menanam dan Pelihara Pohon	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan kehutanan (kali)	1	-	-	-	-	1	180,00	1	216,00	1	259,20	4	655,20	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **04** 17	Fasilitasi, Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Perlindungan Hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam di areal KPHP Model Tasik Besar Serkap	Meningkatnya kesadaran akan fungsi hutan di masyarakat sekitar kawasan hutan yang berada pada areal KPHP Model Tasik Besar Serkap (desa)	-	4	200,00	5	300,00	5	360,00	5	360,00	5	360,00	24	1.580,00	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **04** 18	Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Perlindungan Hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Terlaksananya kegiatan pengamanan perlindungan hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (Izin)		-	-	5	200,00	5	240,00	5	288,00	5	345,60	20	1.073,60	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **04** 19	Fasilitasi penanganan konflik areal pada wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Terlaksananya penanganan konflik pada areal KPHP Model Tasik Besar Serkap (Kasus)		-	-	4	200,00	5	240,00	6	288,00	7	345,60	21	1.073,60	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **04** 20	Diklat teknik pengamanan hutan partisipatif bersama masyarakat	Terlaksananya pelatihan teknik pengamanan hutan partisipatif (angkatan)	-	-	-	-	-	4	600,00	4	720,00	5	864,00	13	2.184,00	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **04** 21	Fasilitasi, bimbingan teknis dan pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/hak/desa	Terfasilitasi dan terbimbingnya pengamanan hutan adat/hak/desa skala provinsi (Lokasi)		-	-	5	150,00	6	180,00	7	216,00	9	259,20	27	805,20	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **04** 22	Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Tingkat Pelaksana Pola	Terbentuknya Polisi Kehutanan pola kemitraan (Angkatan)	-	-	-	1	-	1	500,00	1	500,00	1	500,00	4	1.500,00	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 23	Kampanye Penyelamatan Hutan Riau	Terlaksananya kampaye penyelamatan hutan Riau (Kali)	-	-	-	5	-	6	-	7	-	9	-	27	-	Perlindungan Hutan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **04** 24	Pengawasan Penggunaan Izin Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya pencegahan terhadap penyelewengan penggunaan ijin pemanfaatan hutan (kasus)	1	-	-	-	-	2	200,00	2	200,00	2	200,00	11	600,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 25	Fasilitasi Konflik Areal Pemanfaatan Hutan	Terwujudnya fasilitasi terhadap konflik areal pemanfaatan hutan (kasus)	-	-	-	-	-	3	300,00	3	300,00	2	200,00	10	800,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 26	Pengadaan Sarana & Prasarana Polisi Kehutanan	Tersedianya sarana prasarana operasional polisi kehutanan (polhut) dan PPNS Kehutanan (unit)	4	-	1.040,00	4	500,00	4	1.500,00	4	1.500,00	4	1.500,00	20	6.040,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 27	Pengadaan Sarana & Prasarana PPNS Kehutanan	Tersedianya sarana mobilitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) (unit)	-	-	-	-	-	2	800,00	2	800,00	2	800,00	8	2.400,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
	2.Mewujudkan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan	**Melaksanakan pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan**	2 03 **04** 28	Pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan (kasus)	Terlaksananya pengawasan illegal mining dalam kawasan hutan (kasus)	-	-	-	-	-	3	300,00	3	300,00	2	200,00	10	800,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
	3.Terwujudnya pengawasan peredaran bibit	**Melaksanakan pengawasan peredaran bibit**	2 03 **04** 29	Pengawasan peredaran bibit (kasus)	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit (kasus)	-	-	-	-	-	3	300,00	3	300,00	2	200,00	10	800,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
	4.Terwujudnya pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan	**Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara berkesinambungan**	2 03 **04** 30	Pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan (kasus)	Meningkatkan pengawasan areal calon rehabilitasi hutan dan lahan (kasus)	-	-	-	-	-	1	100,00	2	200,00	1	100,00	5	400,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
	5.Terwujudnya pengawasan terhadap pencadangan areal HTR	**Melaksanakan pengawasan terhadap pencadangan areal HTR**	2 03 **04** 31	Pengawasan terhadap areal yang dicadangkan sebagai HTR (kasus)	Terlaksananya pengawasan terhadap areal yang dicadangkan sebagai HTR (kasus)	1	-	-	-	-	1	100,00	2	200,00	1	100,00	6	400,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
	6.Terwujudnya pemahaman hukum masyarakat dalam pemanfaatan hutan	**Melakukan upaya preventif melalui penyuluhan pemahaman hukum dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan kepada masyarakat**	2 03 **04** 32	Sosialisasi dan Penyadaran Hukum Kehutanan kepada masyarakat desa sekitar hutan se Provinsi Riau	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan melalui penyuluhan (desa)	-	-	-	-	-	6	100,00	6	100,00	6	100,00	24	300,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
			2 03 **04** 33	Pengamanan sarana prasarana perlindungan hutan (patroli)	Meningkatnya keamanan sarana prasarana perlindungan hutan (patroli)	-	-	-	-	-	10	150,00	10	150,00	10	150,00	40	450,00	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **04** 34	Pengelolaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Perlindungan Hutan pada Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya manfaat hutan lindung sesuai dengan fungsinya (Lokasi)	4	4	360,00	-	-	4	840,00	4	1.008,00	4	1.209,60	4	3.417,60	Bidang Perlindungan Hutan	se Prov. Riau
3. Menertibkan penatausahaan bahan baku kayu industri kehutanan	**Tercapainya tertib pemenuhan bahan baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**Terselesaikannya kasus terkait pemenuhan bahan baku industri**	2 03 **04** 35	Penyelesaian kasus, saksi ahli, pengukuran dan pengujian bahan baku industri	Terselesaiakannya kasus, saksi ahli, pengukuran dan pengujian bahan baku industri	10 kasus	-	-	-	-	2	8,00	2	8,00	2	8,00	10	24,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
Misi 4 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan																		-		
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan	**1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor kawasan hutan KPHP Minas Tahura**	**Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan**	**2 03 05**	**Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan**	**Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi**			**1.480,00**		**4.395,00**		**3.215,00**		**3.493,00**		**3.866,60**		**16.449,60**		
			2 03 **05** 1	Peningkatan Peran Serta masyarakat sekitar kawasan KPHP Minas Tahura	Meningkatnya kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat sekitar kawasan KPHP Minas Tahura (desa)	-	-	-	-	-	4	250,00	4	250,00	2	250,00	10	750,00	KPHP Minas Tahura	se Prov. Riau
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau	**2.Perhitungan stok karbon dari deforestasi dan degradasi hutan produksi Provinsi Riau**	**Tersedianya plot demonstrasi aktifitas**	2 03 **05** 2	Pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)	Meningkatnya stok karbon dalam kawasan hutan (Plot)	-	3	200,00	5	200,00	5	450,00	5	450,00	5	500,00	23	1.800,00	Planologi Kehutanan	se Prov. Riau
3. Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan	**3.Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif dan berwawasan lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat**	**Terjaganya fungsi hutan, penataan ruang dan lingkungan**	2 03 **05** 3	Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri	Meningkatkan Kesadaran Pengusaha Hutan yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat	-	1	350,00	1	250,00	1	400,00	1	450,00	2	500,00	6	1.950,00	Pemanfaatan Hutan	se Prov. Riau
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan unit hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (ijin)	2 03 **05** 4	Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD dan HHBK Unggulan Daerah	Meningkatnya peran masyarakat dalam Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan HTR, HKm Hutan Desa dan HHBK Unggulan Daerah (Kab/Kota)	-	5	200,00	9	300,00	5	400,00	5	400,00	5	400,00	12	1.700,00	Bidang pemanfaatan	Se-Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **05** 5	Pembinaan Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (IUPHHK-HA) & Produksi Hasil Hutan Kayu	Meningkatnya kinerja pengusahaan hutan alam / restorasi ekosistem dan meningkatnya tanggung jawab para pihak dalam penyampaian data produksi (unit)		4	175,00	4	175,00	-	-	-	-	-	-	4	350,00	Bidang pemanfaatan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 6	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Pariwisata Alam, Jasa Lingkungan, Pendidikan dan Penelitian KPHP Model Minas Tahura	Tersedianya data potensi Wisata Alam, Jasa Lingkungan, pendidikan dan Penelitian KPHP Minas Tahura (Lokasi)	1	1	180,00	1	-	-	-	-	-	-	-	1	180,00	KPHP Minas Tahura	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 7	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan perizinan koridor pada kawasan hutan	Data dan laporan penyelenggaran perizinan dan penggunaan koridor (Lokasi)		-	-	16	150,00	-	-	-	-	-	-	16	150,00	Planoligi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi perizinan pada KPHP Model Tasik Besar (izin)		-	-	17	150,00	-	-	-	-	-	-	17	150,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 9	Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada areal UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan dan sumberdaya hutan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (laporan)	-	-	-	1	150,00	1	150,00	1	150,00	1	150,00	4	600,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	Se-Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	**4. Meningkatnya keragaman produk kehutanan bukan kayu atau HHBK**	**Terbinanya unit usaha pemanfaatan HHBK serta pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu**	2 03 **05** 10	Pembinaan, Pengembangan & Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Daerah	Meningkatnya dan terbinanya unit usaha pemanfaatan HHBK serta pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu	1	1	200,00	-	-	1	250,00	1	250,00	1	250,00	5	950,00	Bidang pemanfaatan Hutan	Se-Provinsi Riau
	6. Meningkatkan kualitas pendampingan dari tenaga penyuluh kehutanan	**Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur penyuluh kehutanan sebagai tenaga pendamping masyarakat di lapangan**	2 03 **05** 11	Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparatur penyuluh kehutanan (PKSM)	Terpenuhinya kebutuhan penyuluh masyarakat (PKSM) sekaligus meningkatkan pengetahuan di bidang kehutanan terutama potensi HHBK (orang)	30		-	-	-	80	300,00	80	360,00	80	432,00	270	1.092,00	UPT PKPM	Se-Provinsi Riau
5. Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman	**7.Pengelolaan kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi pada 60 izin**	**Terkelolanya kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi**	2 03 **05** 12	Kegiatan pembinaan pengelolaan areal tidak efektif untuk produksi pada usaha bidang kehutanan	Terkelolanya kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi seluas 30 % dari luas areal konsesi (lokasi)	10	20	175,00	-	-	20	175,00	20	175,00	20	175,00	70	700,00	UPT BRKH	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 13	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum KPHP Model Minas Tahura	Tersedianya Infrastruktur dan Fasilitas Umum kawasan wisata alam KPHP Model Minas Tahura (Lokasi)	1	-	-	1	250,00	1	300,00	1	360,00	1	432,00	1	1.342,00	KPHP Minas Tahura	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 14	Penguatan program Restorasi lahan gambut	Termanfaatkannya areal yang tidak dibebani hak secara optimal (lokasi)	-	-	-	2	250,00	2	300,00	2	360,00	2	432,00	2	1.342,00	Bidang pemanfaatan Hutan	Bengkalis, Pelalawan, Siak, Meranti, Rohil, Inhil
			2 03 **05** 15	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)	Terlaksananya Fasilitasi pembentukan KPHP//KPHL Provinsi Riau dan Kab./Kota (Lokasi)				5	200,00	5	240,00	5	288,00	5	345,60	12	1.073,60	Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 16	Pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja Unit pemanfaatan hutan produksi IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA	Terlaksananya data dan informasi pelaksanaan tata bats luar areal IUPHHK - HT/HA (Lokasi)	16	-	-	15	170,00	-	-	-	-	-	-	31	170,00	Bidang Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & hutan produksi	**Batas kawasan hutan kelihatan jelas di lapangan**	2 03 **05** 17	Penyusunan statistik dinas kehutanan	Tersusunnya buku statistik dinas kehutanan Provinsi Riau (judul)	1	-	-	1	120,00	-	-	-	-	-	-	1	120,00	Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 18	Pengembangan sistem informasi kehutanan	Tersedianya sistem jaringan informasi kehutanan (Paket)	1	-	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	1	200,00	Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 19	Pengendalian Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (lokasi)				15	180,00	-	-	-	-	-	-	15	180,00	Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 20	Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian penggunaan kawasan hutan non prosedural	Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	11			15	200,00	-	-	-	-	-	-	15	200,00	Planologi Kehutanan	Se-Provinsi Riau
			2 03 **05** 21	Pengembangan sarana & prasarana KPHP Model Tasik Besar Serkap	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Unit)	1	-	-	1	300,00	-	-	-	-	-	-	2	300,00	KPHP Model TBS	KPHP Model TBS
			2 03 **05** 22	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPHP Model Tasik Besar Serkap & Peningkatan kopetensi serta pemahaman para pihak/ masyarakat	Terbentuknya Pengelolaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dengan melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (Desa)	-	-	-	4	200,00	-	-	-	-	-	-	4	200,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **05** 23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan pemahaman para pihak/ masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura (Desa)	-	-	-	4	200,00	-	-	-	-	-	-	4	200,00	UPT KPHP Model Minas Tahura	KPHP Model Minas Tahura
			2 03 **05** 24	Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Inventarisasi Kawasan Hutan lintas Kab/Kota (Ha)	22.500	-	-	30.000	200,00	-	-	-	-	-	-	30.000	200,00	Bidang Planologi Kehutanan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **05** 25	Monitoring , evaluasi, update data dan Peta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan provinsi Riau	Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)		-	-	10	100,00	-	-	-	-	-	-	10	100,00	Bidang Planologi Kehutanan	se Prov. Riau
			2 03 **05** 26	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan survey lapangan	Tersedia dan terpeliharanya peralatan survey Dinas Kehutanan Provinsi Riau (unit)	69			85	150,00	-	-	-	-	-	-	85	150,00	Bidang Planologi Kehutanan	Pekanbaru
			2 03 **05** 27	Pengadaan citra satelit dan penutupan vegetasi kawasan hutan provinsi Riau	Tersedianya citra satelit resolusi sedang (dokumen)	20			2	300,00	-	-	-	-	-	-	2	300,00	Bidang Planologi Kehutanan	se Prov. Riau
6. Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan	**8.Terlaksananya penyeimbangan secara bertahap suplai demand kayu**	**Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri sesuai dengan kapasitas industri**	**2 03 06**	**Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan**	**Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (Unit)**	**35**	**30**	**1.517,00**	**35**	**1.200,00**	**35**	**2.619,00**	**35**	**2.973,00**	**35**	**3.377,80**	**35**	**11.686,80**		
	9.Terlaksananya tertib penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan	**Tertibnya penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan**	2 03 **06** 1	Pembinaan dan pengawasan penatausahaan blanko dokumen angvkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan	Terbinanya dan tertibnya penatausahaan blanko dokumen angvkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan (unit)	37	43	360,00	55	350,00	55	500,00	60	550,00	60	550,00	60	2.310,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
	10.Terwujudnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara optimal	**Optimalnya penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan**	2 03 **06** 2	Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan dan dana bagi hasil (DBH) daerah	Tertata dan terselenggaranya penatausahaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan (kab/Kota)	11	11	410,00	11	400,00	11	480,00	11	576,00	11	691,20	11	2.557,20	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 3	Kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap pejabat penagih iuran kehutanan	Terbinanya pejabat penagih iuran kehutanan di Kabupaten/kota, (Kali)	12	-	-	-	-	22	200,00	22	250,00	22	300,00	22	750,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **06** 4	Kegiatan monitoring pengenaan, pemungutan dan pembayaran IIUPH, PSDH dan DR serta SPT Rampung	Termonitornya pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan pembayaran IIUPH, PSDH dan DR serta SPT rampung oleh wajib bayar (Jumlah Wajib Bayar)	62	-	-	-	-	62	300,00	62	350,00	62	400,00	62	1.050,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 5	Kegiatan rekonsiliasi penerimaan IIUPH, PSDH dan DR dengan Kab./kota dan instansi terkait	Tersedianyan data PNBP dan DBH sektor Kehutanan, melalui rekonsiliasi dengan kab/kota dan kementerian (Kali)	6	-	-	-	-	12	360,00	12	360,00	12	420,00	12	1.140,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 6	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri kehutanan dan bahan baku industri	Laporan Kegiatan Industri serta Optimalisasi HHK (kab./Kota)	21	21	356,00	21	250,00	21	300,00	21	360,00	21	432,00	21	1.698,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 7	Pembinaan penatausahaan hasil hutan kayu di TPK Antara	Terpenuhinya bahan baku yang lestari bagi IPHHK (Unit)		10	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	140,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 8	Pemeriksaan keberadaan IPHHK yang tidak aktif	Terpantaunya Status IPHHK yang tidak aktif (kapasitas s/d 6.000 m3/tahun (Laporan)	1	-	111,00	10	100,00	10	120,00	10	144,00	10	172,80	40	647,80	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 9	Pembinaan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu IPHHK	Tersosialisasinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu IPHHK Kap. > 2.000 s/d 6.000 m3/th. (Unit)	17	17	140,00	17	100,00	17	120,00	17	144,00	17	172,80	17	676,80	Bidang PPHH	se Prov. Riau
			2 03 **06** 10	Pembinaan dan penertiban supli bahan baku industri	30 unit	30 unit	-	-	30	-	30	239,00	30	239,00	30	239,00	147	717,00	Bidang PPHH	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
7. Mengoptimalkan kemitraan kehutanan	**Terwujudnya pengembangan kemitraan kehutanan secara optimal**	**Optimalnya kemitraan kehutanan**	**2 03 07**	**Program Perencanaan dan pengembangan baton**	**Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan**			**-**		**400,00**		**-**		**-**		**-**		**400,00**		
			2 03 **07** 1	Pengembangan, fasilitasi dan pembinaan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPHP Model Minas Tahura	Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat swasta di wilayah KPHP Model Minas Tahura (kali)				3	150,00	-	-	-	-	-	-	3	150,00	KPHP Model Minas Tahura	KPHP Model Minas Tahura
			2 03 **07** 2	Pengembangan, Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta & terlaksanaya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat/swasta di sekitar wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali)	-	-	-	3	150,00	-	-	-	-	-	-	3	150,00	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
			2 03 **07** 3	Pembangunan model pengembangan usaha budidaya Gaharu	Terbangunnya model usaha budidaya gaharu (Unit)	-	-	-	1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	100,00	UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan	Lubuk Sakat, Kampar
Misi 5 : Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya																				
1. Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan			**2 03 08**	**Program Perencanaan dan pengembangan hutan**	**Terpelihara dan terjaganya batas kawasan hutan serta memberi kepastian hukum terhadap kawasan hutan**			**4.533,00**		**-**		**7.584,00**		**8.801,00**		**9.921,20**		**29.939,20**	**30.339,20**	
	1. Terpeliharanya batas kawasan hutan lindung & produksi	**1.Batas kawasan hutan kelihatan jelas di lapangan**	2 03 **08** 1	Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan Lintas Kab/Kota	Memberikan batas yang jelas di lapangan (km)	55	40	200,00	-	-	50	275,00	50	300,00	50	325,00	190	1.100,00	Planologi Kehutanan	se Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT	**2.Terlaksanya penataan batas luar areal kerja IUPHHK-HA/HT**	2 03 **08** 8	Pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja Unit pemanfaatan hutan produksi IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan bats luar kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT /HA (lokasi)	12	12	173,00	-	-	25	225,00	25	250,00	25	275,00	87	923,00	Planologi Kehutanan	se Prov. Riau
			2 03 **08** 9	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaatan Hutan Produksi dalam Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap	Tersedianya data dan informasi tentang batas areal perusahaan di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Unit)	-	-	-	-	-	4	150,00	4	150,00	4	150,00	12	450,00	KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap
	3. Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan	**3.Tertibnya penggunaan kawasan hutan**	2 03 **08** 10	Monitoring, evaluasi, Update Data dan Peta penggunaan dan pemanfaaatan kawasan hutan	Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	9	9	250,00	-	-	10	300,00	11	350,00	11	400,00	41	1.300,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 11	Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (lokasi)	8	8	300,00	-	-	10	375,00	10	400,00	10	450,00	38	1.525,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 12	Monitoring & Evaluasi perizinan pada KPHP Model Tasik Besar Serkap	Termonitornya izin pemanfaatan, penggunaan serta perizinan lainnya yang ada pada wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (Izin)	-	9	200,00	-	-	17	600,00	17	700,00	17	700,00	17	2.200,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	KPHP Model Tasik Besar Serkap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	4. Tetibnya penyelenggaraan perizinan jaringan jalan dan koridor pada kawasan hutan	**4.Jaringan jalan dan koridor sesuai dengan perizinan**	2 03 **08** 13	Monitoring penyelenggaraan perizinan koridor pada kawasan hutan	Data dan laporan penyelenggaran perizinan dan penggunaan koridor (Lokasi)	13	19	200,00	-	-	15	250,00	15	275,00	15	300,00	77	1.025,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
	5. Tertibnya Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan	**5.Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan**	2 03 **08** 14	Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian penggunaan kawasan hutan non prosedural	Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit)	11	11	300,00	-	-	15	375,00	12	400,00	13	450,00	51	1.525,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
	6. Terinventarisasinya kawasan hutan	**6.Tersedianya data potensi tegakan hutan**	2 03 **08** 15	Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Inventarisasi Kawasan Hutan lintas Kab/Kota (Ha)	22.500	22.500	250,00	-	-	30.000	300,00	30.000	300,00	30.000	300,00	135.000	1.150,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
2. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi	**1. Tersusunnya rencana makro penyelenggaraan kehutanan provinsi, statistik, dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan**	**1.Tersedianya dokumen rencana penyelenggaraan kehutanan Provinsi Riau**	2 03 **08** 16	Penyusunan review rencana kehutanan tingkat provinsi	Tersedianya dokumen rencana makro kehutanan provinsi (Judul)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350,00	2	350,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 17	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)	Terlaksananya Fasilitasi pembentukan KPHP//KPHL Provinsi Riau dan Kab./Kota (Lokasi)	4	-	-			5	24,00	5	288,00	5	345,60	15	657,60	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
3. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP Minas Tahura	**Menyamakan persepsi terhadap status kawasan KPHP Minas Tahura antar Para Pihak**		2 03 **08** 18	Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan KPHP Model Minas Tahura	Memberikan batas kawasan KPHP Minas Tahura yang jelas di lapangan (Km)	-	-	-	-	-	50	250,00	50	250,00	50	250,00	150	750,00	KPHP Minas Tahura	KPHP Minas Tahura
4. Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan	**1. Terwujudnya peningkatan kinerja dengan dukungan peralatan yang memadai**		2 03 **08** 19	Pengadaan peralatan ukur lapangan	Adanya peralatan ukur lapangan untuk kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Unit)	4	4	200,00	-	-	100	250,00	115	250,00	125	250,00	344	950,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 20	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan survey lapangan	Tersedia dan terpeliharanya peralatan survey Dinas Kehutanan Provinsi Riau (unit)	69	69	250,00	-	-	75	300,00	80	350,00	80	350,00	304	1.250,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 21	Pengembangan sarana & prasarana KPHP Model Tasik Besar Serkap	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Unit)	1	1	300,00	-	-	2	1.000,00	2	1.500,00	2	1.500,00	2	4.300,00	KPHP Model TBS	se Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2 03 **08** 22	Pengadaan citra satelit	Tersedianya citra satelit resolusi sedang (dokumen)	20	2	150,00	-	-	2	370,00	2	400,00	2	430,00	8	1.350,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 23	Pengadaan peta penutupan vegetasi kawasan hutan provinsi Riau	Peta penutupan vegetasi kawasan hutan provinsi Riau (kab/kota)	12	12	250,00	-	-	12	450,00	12	500,00	12	550,00	12	1.750,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 24	Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan & Anggaran Pembangunan Kehutanan Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Kehutanan yang Terencana dan Tepat waktu (satker)	-	15	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	350,00	Sekretariat	Pekanbaru
			2 03 **08** 25	Rapat Koodinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghut da) Provinsi Riau	Tersusunnya Rencana dan Program Pembangunan Kehutanan (Kali)	-	1	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250,00	Sekretariat	Pekanbaru
5. Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi	**Terwujudnya data dan informasi kehutanan Provinsi yang berkualitas**		2 03 **08** 26	Penyusunan Profil Kehutanan Provinsi Riau	Tersedianya dokumen profil kehutanan provinsi (Judul)	-	1	250,00	-	-	1	300,00	1	300,00	1	350,00	4	1.200,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 27	Penyusunan statistik dinas kehutanan	Tersedianya dokumen statistik kehutanan provinsi (Judul)	1	1	160,00	-	-	1	250,00	1	300,00	1	350,00	1	160,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 28	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Tasik Besar Serkap & Peningkatan kopetensi serta pemahaman para-para pihak	Terbentuknya Pengelolaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dengan melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (Desa)	-	2	300,00	-	-	6	900,00	5	750,00	6	900,00	19	2.850,00	UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap	se Provinsi Riau
			2 03 **08** 29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan pemahaman para pihak/ masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura (Desa)	-	2	-	-	-	4	240,00	4	288,00	4	345,60	14	873,60	UPT KPHP Model Minas Tahura	se Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian/Bidang/UPT Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6. Memantapkan sistim jaringan dan komunikasi data kehutanan provinsi	**Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem jaringan komunikasi data kehutanan**		2 03 **08** 30	Pengembangan sistem informasi kehutanan	Tersedianya sistem jaringan informasi kehutanan (Paket)	1	1	200,00	-	-	1	400,00	1	500,00	1	600,00	4	1.700,00	Planologi Kehutanan	se Provinsi Riau
		Meningkatnya kualitas data dan informasi potensi pemanfaatan hasil hutan (judul)	**2 03 09**	**Program pengembangan data dan informasi**	**Meningkatnya kualitas data dan informasi kehutanan**	**-**	**1**	**250,00**	**1**	**250,00**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**		**500,00**		
			2 03 **09** 1	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan (Kali)	Keikutsertaan Kegiatan Pameran Tahunan (Riau Expo)			250,00	2	250,00			-	-	-	-	2	500,00	UPT Pelatihan & Pemberdayaan Masyarakat	Pekanbaru
Misi 6 : Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan																		-		
1. Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan	**1. Terlaksananya program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdaya guna dan tepat sasaran bagi masyarakat**	**Terlaksananya program TJSP kehutanan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat**	**2 03 10**	**Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri**	**Meningkatnya tanggungjawab sosial perusahaan pemegang izin**	**-**	**38**	**250,00**	**38**	**350,00**	**55**	**600,00**	**55**	**600,00**	**55**	**600,00**	**275**	**2.400,00**		
			2 03 **10** 1	Monitoring dan validasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusaqhaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan se Provinsi Riau	Terbina dan termonitornya pelaksanaan Tanggung JawabSosial Perusahaan pemegang ijin di bidang kehutanan (Unit)	31	38	250,00	38	350,00	55	600,00	55	600,00	55	600,00	275	2.400,00	Bidang pemanfaatan Hutan	Se Provinsi Riau
2. Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	**1.Meningkatnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan**	**Optimalnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan**	**2 03 11**	**Program optimalisasi peran badan usaha bidang kehutanan dalam pembangunan**	**Meningkatken kerjasama dengan badan usaha di sektor kehutanan**	**-**		**-**		**-**	**5**	**250,00**	**10**	**500,00**	**10**	**500,00**	**25**	**1.250,00**		
			2 03 11 01	Peningkatan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	-	-	-	-	-	5	250,00	10	500,00	10	500,00	25	1.250,00	UPT PKPM	Se Provinsi Riau

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3.2.1.5.	Kehutanan							
	a. Luas Pemanfaatan Hutan Produksi (Hektar)	2,031,273	2,172,492	2,313,712	2,454,931	2,596,151	2,737,370	2,737,370
	b. Penanganan Tindak Pidana Kehutanan (Kasus)	32	38	43	49	55	60	60
	c. Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis (Hektar)	759,773	760,273	760,773	761,273	761,773	762,273	762,273
	d. Industri Hasil Hutan (Unit)	21	24	27	30	33	36	36
	e. Penggunaan Kawasan Hutan (Hektar)	2,418,902.97	2,626,449	2,833,995	3,041,542	3,249,088	3,456,634	3,456,634